

## LAMPIRAN

### *Lampiran 1*

#### **Pedoman Wawancara**

##### **I. Kepala Desa Sawo**

1. Akses
  - a. Bagaimana kepala desa memberikan informasi untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
  - b. Bagaimana cara kepala desa dapat memberikan informasi dengan mudah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
2. Cakupan
  - a. Berapa cakupan yang bisa dijangkau oleh pemerintah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan, transferan dana?
3. Frekuensi
  - a. Seberapa frekuensi pemberian bantuan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
4. Bias
  - a. Apakah pernah terjadi kesalahan sasaran untuk warga yang akan mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH)?
  - b. Seberapa sering penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk Keluarga Program Keluarga Harapan (PKH)?
5. Service delivery (ketepatan layanan)
  - a. Apakah layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah tepat waktu?
6. Akuntabilitas
  - a. Apa yang dilakukan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
7. Kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan
  - a. Apakah yang dapat diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memang membutuhkan atau tidak?

##### **II. Kepala Desa Dukunanyar**

1. Akses
  - a. Bagaimana kepala desa memberikan informasi untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

- b. Bagaimana kepala desa dapat memberikan informasi dengan mudah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
2. Cakupan
  - a. Berapa cakupan yang bisa dijangkau oleh pemerintah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan, transferan dana?
3. Frekuensi
  - a. Seberapa frekuensi pemberian bantuan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
4. Bias
  - a. Apakah pernah terjadi kesalahan sasaran untuk warga yang akan mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH)?
  - b. Seberapa sering penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk Keluarga Program Keluarga Harapan (PKH)?
5. Service delivery (ketepatan layanan)
  - a. Apakah layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah tepat waktu?
6. Akuntabilitas
  - a. Apa yang dilakukan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
7. Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan
  - a. Apakah yang dapat diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memang membutuhkan atau tidak?

### **III. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sawo**

1. Akses
  - a. Bagaimana cara pendamping dalam menyampaikan informasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
  - b. Bagaimana pendamping dalam memberikan informasi dengan mudah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
2. Cakupan
  - a. Berapa cakupan yang bisa dijangkau oleh pendamping untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan, transferan dana?
3. Frekuensi
  - a. Seberapa frekuensi pemberian bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?

4. Bias
  - a. Apa yang dapat dilakukan oleh pendamping jika terjadi penyimpangan yang dilakukan?
5. Service delivery (ketepatan layanan)
  - a. Apakah layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah tepat waktu?
6. Akuntabilitas
  - a. Apa hak-hak yang dapat diperoleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH)?
  - b. Apa yang dapat dipertanggungjawabkan pendamping kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
7. Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan
  - a. Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan benar-benar membutuhkan atau tidak?
  - b. Apakah masih ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang ada pada aturan atau kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)?

#### **IV. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Dukunanyar**

1. Akses
  - a. Bagaimana cara pendamping dalam menyampaikan informasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
  - b. Bagaimana pendamping dalam memberikan informasi dengan mudah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
2. Cakupan
  - a. Berapa cakupan yang bisa dijangkau oleh pendamping untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan, transferan dana?
3. Frekuensi
  - a. Seberapa frekuensi pemberian bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
4. Bias
  - a. Apa yang dapat dilakukan oleh pendamping jika terjadi penyimpangan yang dilakukan?
5. Service delivery (ketepatan layanan)
  - a. Apakah layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah tepat waktu?

6. Akuntabilitas
  - a. Apa hak-hak yang dapat diperoleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH)?
  - b. Apa yang dapat dipertanggungjawabkan pendamping kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
7. Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan
  - a. Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan benar-benar membutuhkan atau tidak?
  - b. Apakah masih ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang ada pada aturan atau kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)?

#### **V. Warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Sawo**

1. Akses
  - a. Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa mendapatkan kemudahan informasi?
  - b. Bagaimana cara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan informasi?
2. Cakupan
  - a. Berapa cakupan yang bisa dijangkau oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan, transferan dana yang dirasakan?
3. Frekuensi
  - a. Seberapa sering Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah?
4. Bias
  - a. Apakah pernah terjadi ketidaksesuaian pemberian yang dilakukan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
  - b. Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pernah mengetahui terjadinya bias yang dilakukan oleh pemerintah?
5. Service delivery (ketepatan layanan)
  - a. Menurut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) apakah layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan yang diberikan pemerintah sudah tepat waktu?
6. Akuntabilitas
  - a. Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa bahwa pemerintah atau pendamping sudah menjalankan tugas untuk menyampaikan keluaran kebijakan?

7. Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan
  - a. Menurut anda dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini apakah sudah membantu kebutuhan yang selama ini anda rasakan?
  - b. Apakah masih ada warga di sini yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dikarenakan adanya kedekatan dengan pemerintah desa atau keluarga yang masih dianggap mampu?

## **VI. Warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Dukunanyar**

1. Akses
  - a. Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa mendapatkan kemudahan informasi?
  - b. Bagaimana cara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan informasi?
2. Cakupan
  - a. Berapa cakupan yang bisa dijangkau oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan, transferan dana yang dirasakan?
3. Frekuensi
  - a. Seberapa sering Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah?
4. Bias
  - a. Apakah pernah terjadi ketidaksesuaian pemberian yang dilakukan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
  - b. Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pernah mengetahui terjadinya bias yang dilakukan oleh pemerintah?
5. Service delivery (ketepatan layanan)
  - a. Menurut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) apakah layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan yang diberikan pemerintah sudah tepat waktu?
6. Akuntabilitas
  - a. Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa bahwa pemerintah atau pendamping sudah menjalankan tugas untuk menyampaikan keluaran kebijakan?
8. Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan
  - a. Menurut anda dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini apakah sudah membantu kebutuhan yang selama ini anda rasakan?
  - b. Apakah masih ada warga di sini yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dikarenakan adanya kedekatan dengan pemerintah desa atau keluarga yang masih dianggap mampu?

**Lampiran 2****TRANSKRIP WAWANCARA****Transkrip Wawancara 1**

Waktu Wawancara : 21 Maret 2023  
 Tempat Wawancara : Kantor Pemerintah Desa Sawo

**Profil Informan**

Nama : Karno  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Jabatan : Kepala Desa Sawo

**Hasil Wawancara**

- Peneliti : Bagaimana kepala desa memberikan informasi untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
- Informan : Ya biasanya selalu diberikan informasi oleh pendamping masing-masing mbak, lah itu untuk informasinya dari Ketua PKH atau pendamping itu memberikan infonya kepada PKM, kemudian kepala desa atau kesra akan dikasih informasi juga dari pihak pendamping PKH itu mbak, soalnya yang tau seputar informasi ya para pendamping itu yang kemudian disampaikan kepada KPM desa ini, kalau semisal pendamping lupa tidak memberitahukan kepada pihak desa ya kita tidak tau, namanya juga manusia ya mbak kadang ada lupanya, tetapi kita selalu koordinasi selalu mbak.
- Peneliti : Bagaimana cara kepala desa dapat memberikan informasi dengan mudah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
- Informan : Dan untuk informasi selalu disampaikan karena sudah ada grup wa yang mana setiap informasi akan masuk di dalam situ dan akan dibagikan informasinya di dalam group wa itu mbak, dan untuk KPM yang tidak punya wa atau yang tidak punya hp biasanya ketua kelompok yang selalu ikut mendampingi ke KPM langsung entah itu informasi seputar bantuan atau yang lainnya mbak.
- Peneliti : Berapa cakupan yang bisa dijangkau oleh pemerintah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan, transferan dana?
- Informan : Jadi gini kalau KPM yang sudah termasuk mendapatkan bantuan PKH, itu semuanya sudah dapat entah itu mendapatkan layanan

kesehatan, pendidikan maupun layanan kesejahteraan sosial, sesuai dengan komponen kategori bantuan PKH tersebut, jadi orang yang mendapatkan kategori tersebut itu mendapatkan kategori terendah jadi semua pelayanan tentunya menjadi nomor 1.

- Peneliti : Seberapa frekuensi pemberian bantuan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
- Informan : Biasanya dalam setahun cair secara bertahap kayaknya 3 bulan sekali mbak, soalnya pihak desa kurang mengetahui, bisanya langsung pendamping seng mengetahui tentang itu mbak, soale kadang lali gak disampekn nang rene lek udah cair apa belum gitu, tapi untuk setiap KPM itu tentunya dengan nominal yang pasti berbeda, karena tiap KPM harus memiliki komponen sehingga yang diterima pasti tidak sama tergantung komponen yang dimilikinya.
- Peneliti : Apakah pernah terjadi kesalahan sasaran untuk warga yang akan mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH)?
- Informan : Kalau PKH gak akan pernah terjadi, kalau non PKH pasti terjadi karena datanya selalu valid.
- Peneliti : Seberapa sering penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk Keluarga Program Keluarga Harapan (PKH)?
- Informan : Soale kalau ada usulan pasti pendamping langsung terjun ke lapangan untuk mensurvei atau melihat langsung kondisinya gimana terus apa dia memiliki komponen begitu mbak.
- Peneliti : Apakah layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah tepat waktu?
- Informan : Sudah tepat layanan sih kayaknya, soalnya PKH sudah pasti memiliki KIS dan KIP dan semua sudah pakai dan pelayanan sudah cukup baik tidak ada yang membandingkan dan dia KPM juga mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial secara menyeluruh dengan pasti.
- Peneliti : Apa yang dilakukan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
- Informan : Kalau semisal ada informasi kalau bantuan yang molor gitu, ya kita tidak bisa apa-apa karena itu kan dari atasan, jadi ya ditunggu aja pasti cair, gitu se mbak.
- Peneliti : Apakah yang dapat diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memang membutuhkan atau tidak?

- Informan : Iya pasti, soalnya tidak semua orang bisa menjadi anggota PKH karena ada proses-proses, jadi orang yang mendapatkan pasti sudah tepat, dan di desa ini mbak sudah sesuai untuk orang-orang yang menerima bantuan tersebut mbak.
- Peneliti : Bagaimana dampak positif dengan danya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini?
- Informan : Tentunya masyarakat yang mendapatkan bantuan ini sangat terbantu untuk dapat digunakan dalam menunjang kebutuhannya tersebut, seperti halnya bantuan yang diberikan dapat digunakan untuk biaya sekolah maupun lainnya sesuai dengan komponen yang dimiliki. Karena dalam bantuan ini harus memiliki komponen yang sesuai dengan aturan, maka KPM yang mendapatkan bantuan ini tentunya akan mendapatkan layanan seperti halnya berupa layanan kesehatan, terus pendidikan dan juga layanan berupa kesejahteraan itu mbak. Sehingga layanan-layanan yang diberikan tersebut tentunya dapat memantau atau mendapatkan layanan seperti yang lainnya begitu mbak. Dengan adanya bantuan PKH ini kan ada beberapa yang diberikan KPM entah itu uang maupun berapa bantuan seperti beras atau lainnya, untuk itu tentunya tidak ada alasan lagi hal negatif lainnya yang dipakai alasan karena pendapatan dan pengeluaran yang tidak seimbang tersebut. Bantuan PKH ini juga tentunya tidak hanya melulu tentang bantuan yang diberikan, tetapi juga di dalamnya ada pendampingan untuk mengubah pola pikir atau mindset KPM. Supaya selalu tidak menggantungkan bantuan yang diberikan secara terus menerus begitu mbak. Dengan adanya bantuan ini mbak, juga dapat meminimalisir angka kemiskinan yang ada mbak, sebagaimana tujuan yang ada peraturan tersebut bahwa program ini digunakan dalam meminimalisir angka kemiskinan yang tinggi tersebut mbak.
- Peneliti : Bagaimana dampak negatif Program Keluarga Harapan (PKH) ini?
- Informan : Dengan adanya program bantuan sosial yang diberikan kepada KPM ini mbak, yo bisa membuat kecemburuan sosial kepada masyarakat, terkait bantuan yang diberikan, ada warga yang iri begitu mbak, sehingga bantuan ini harus benar-benar sesuai sasaran sehingga tidak menimbulkan hal kecemburuan kepada masyarakat. Dengan adanya bantuan ini juga terkadang membuat seseorang selalu mengharapkan bantuan seng diberikan gitu mbak. Biasanya dengan adanya bantuan orang juga membuat seseorang malas bekerja sehingga merintih meminta bantuan, karena sudah ada bantuan yang diberikan tersebut.



## Transkrip Wawancara 2

Waktu Wawancara : 23 Maret 2023

Tempat Wawancara : U Cafe

### Profil Informan

Nama : Syaiful Arif  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Jabatan : Pendamping PKH Desa Sawo

### Hasil Wawancara

Peneliti : Bagaimana cara pendamping dalam menyampaikan informasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?

Informan : Untuk menyampaikan informasi yang ada mbak, itu secara langsung melalui wa, lewat grup kelompok itu sendiri yang khususnya yang memiliki hp.

Peneliti : Bagaimana pendamping dalam memberikan informasi dengan mudah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?

Informan : Contohnya misal kayak anaknya itu kan pasti memiliki hp ya mbak, sebelumnya itu di edukasi dulu atau diberitahu dulu seputar informasi yang kami berikan untuk disampaikan kepada KPM yang mendapatkan tersebut, itu mediasi yang pertama. Untuk yang kedua pendamping langsung pertemuan yang pertama itu biasanya lewat ketua kelompok dulu untuk bisa disampaikan ke yang lainnya, kalau aku pribadi ke ketua kelompok dulu, baru nanti ketua kelompok menyampaikan ke anggotanya yang lain. Di sawo yang mendapatkan KPM ini kan banyak ya mbak, jadi untuk 1 kelompok itu kelompoknya maksimal 30, tapi kebanyakan 1 kelompok itu 15-20 sudah cukup, jadi 1 orang ketua kelompok itu membawahi anggotanya itu kebanyakan 20 orang pokoknya macem-macam lah, jadi medianya hanya lewat hp sama ketua kelompok atau bisa langsung kunjungan ke rumah-rumah. Kalau kunjungan satu per satu kan nggak mungkin ya mbak jadi kebanyakan lewat kelompok atau melalui wa yang ada itu mbak. Nek kunjungan iku biasanya ada sangkut paut dengan KPM tersebut, contoh bekne kok pas lapo gak cair, ATM.e lapo ta ngunu, nah karena ada permasalahan, jadi di edukasi di cari, ATM nya itu mungkin kesalahan NIK atau apa terus mungkin anomaly atau bermasalah, lah nanti pendamping yang akan

mengeksekusi ngurusi bantu, ngurusi prosesnya tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya DTKS yang otomatis bisa handle perbaikan data kan dari perangkat desa, dadi diarahkan ke situ melalui pendamping. Nek biasae cara dengan mudah yo iki mbak pendamping langsung turun tangan untuk memberikan pemahaman kepada KPM, soale kadang lewat orang lain iki yo gak iso mbak, kadang ngene mbak ketua kelompok itu hanya sebatas, nang nek sekirane gambaran secara umum iku sek iso menangkap, tapi lek masalah data iku kan jelimet dadi iku pendamping seng jelasno biasane, soale nek masalah informasi dana cair terus oleh bantuan piro iku wes podo faham, sudah menghitung sendiri kayaknya, jadi cukup lewat ketua kelompok itu saja bisa.

Peneliti : Berapa cakupan yang bisa dijangkau oleh pendamping untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan, transferan dana?

Informan : Kalau menurutku kalau KPM itu sudah mencakup secara keseluruhan bantuan PKH iki mbak, soale sing mendapatkan PKH iki kan jelas sesuai komponen yang dimiliki, dadi dek ne yo oleh layanan pendidikan, kesehatan, terus yo kesejahteraan sosial. Dan untuk terkait jenis layanan-layanan tersebut ada beberapa komponen sendiri untuk menerima layanan itu mbak, jumlah bantuan seng diberikan kepada KPM yo sesuai dengan komponen yang dimilikinya itu tadi mbak.

Peneliti : Seberapa frekuensi pemberian bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?

Informan : Berarti iki mbak semisal yo maret iki kan cair langsung ke KPM, jadi orang yang membelanjakan ya KPM itu sendiri sekarepe KPM, jadi sesuai triwulan mbak, jadi yo dalam setahun empat kali, nek dalam PKH yo dadi contoh setahun iki cair peng papat yaiku, dadi layanan iku yo melalui pencairan iku, untuk pendampingan mindset yo setiap hari bisa, dadi ono yo nek nggone FDS (Family Development Session) iku pembelajaran kan ada banyak modul, dadi ono modul gae kesehatan, kanggo pendidikan dewe kepiye carane bimbing anak sing apik, terus bagaimana saiki ono tambahan modul bagaimana mencegah anak iki mau ben gak stunting iku mau, dadi kita itu memfasilitasi di pendidikan sesuai modul sing ono nek PKH iku mau, terus modele ngene PKH iku yo di sekolah no yo dikei duek modele koyo ngunu, dadi layanan fasilitas bansos yo mek empat kali dalam setahun yo nek ngomong sering iku mau mbak, soale kan mencakup secara keseluruhan iku mau

mulai komponen kehamilan sampek iku kan podo kabeh dadi kudu sesuai dengan jumlah bantuan yang ada, soale jumlah bantuan iku biasane berubah kebijakane tiap tahune, sing disik kae ibu hamil 2.400.000 dengan empat kali pencairan yo iku ngono, dadi gae anak SD 700.000 kae dibagi peng papat yo iku, SMP 900.000 dibagi peng papat yaiku pencairane yo iku, dadi komponen setiap keluarga sak KK iku enek lansia, balita, dadi yo dijumlah totale iku mau ae. Untuk pencairane gak berubah yo triwulan, iki kan 2022 pencairan terakhir kan desember, nek gak salah iku aku sek iling tanggal 27 cair, lah iki tahun wingi cair, lah iki kan awal tahun berarti awal lagi, yo berarti maret iki cair, siaki cair dadi tiap tiga bulan cair wes ngunu tok, dadi untuk tanggale gak pasti yang penting bulan iki cair.

Peneliti : Apa yang dapat dilakukan oleh pendamping jika terjadi penyimpangan yang dilakukan?

Informan : Di graduasi mbak, komitmen jadi ada beberapa komitmen syarat untuk KPM, nek gak nurut dengan pendamping, nurut dengan hal apa itu yo koyo menyalahgunakan duite. Terus iki yo lek semisal enek seng mampu terus oleh yo kita ke rumahnya ditakoni, penghasilane dan iku dari tetangga juga dan dari perangkat desa yang pastinya sudah tau seluk beluknya iki temen ta pak wong iki sugih , iki temen ta wong iki opo jenenge melarat, mbujuk.i dan iku lainnya, kita crosscheck ke rumahnya langsung menggali data bahwa orang tersebut orang itu benar-benar sudah layak tidak mendapatkan bantuan tersebut ya harus kita cabut, melalui edukasi dan gak mbos langsung ditarik ngunu iku gak mbak, dadi diedukasi sek, ditakoni, didemakno dadi yo diomongi sek mbak, jadi kita tidak bisa menjadi patokan rumah untuk patokannya tapi yang dijadikan patokan ya terkait ekonomi keluarga, kita juga menjadikan acuan tersebut untuk layak mendapatkan bantuan, jadi rumah tidak bisa menjadikan patokan, tapi lek semisal wonge ndue tanah pirang-pirang kedok omboh barang ngunu perlu wajib dihapus mbak, soale asset tertinggi kan tanah dadi ono ngono.

Peneliti : Apakah layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah tepat waktu?

Informan : Dadi kan pendamping iki biasane kan komunikasi sama pihak kesehatan, tetapi saiki jarang, nek dulu dadi kita sama apa pihak kesehatan sekolahan iku kan tiap bulan koordinasi langsung penyambung lidah lah intine, dadi koordinasi bahwa ini KPM, soale enek absene dadi di absen untuk kita menanyakan, untuk tepat waktu

atau tidaknya untuk layanan kesehatan itu tergantung orangnya yang penting bansosnya itu setiap tahun 4 kali itu sesuai dengan caire iku mau, dadi dekne nyekel duwek gak nyekel gawe priksa mau yowes urusane ibue mau, sepenting kita sudah edukasi duek mau iki manfaatno gae kesehatane saman gae tuku obat, makanan bergizi dan lainnya kan sudah ada pembelajaran makanan bergizi ngunu mau mbak, lek biyen iki enek absene mbak baik itu layanan kesehatan maupun lainnya gitu mbak.

Peneliti : Apa hak-hak yang dapat diperoleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH)?

Informan : Hak seng dapat diperoleh itu yo iki mbak, soale PKH iki kan fokuse nang mindset pola pikir, dadi ben iso berdaya sendiri, mereka iso mandiri, mereka iso terentas dari kemiskinan iku mau, dengan pola pikir yang salah kan ada pembelajarane di situ, lek hak-hak seng dapat diperoleh yo iki mau dia hak.e oleh duek, oleh pembelajaran untuk bagaimana meningkatkan taraf hidup sosial ekonomi mereka, dadi hak-hak sosial PKH yo iku mau mbak

Peneliti : Apa yang dapat dipertanggungjawabkan pendamping kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?

Informan : Yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pendamping mbak lek semisal enek bantuan telat ngunuku yo semisal enek seng wes cair tapi dekne durung cair yo diomongi ae lek ono gelombang dadi yo mungkin sampean gelombang 2 gek cair, dadi yo diomongi ae dijelasno, lek semisal bener-bener gak cair polakno datae bermasalah yo dikongkong ngecek sek datae enek seng ganda opo gak iku namae data anomali kan dadine gak cair mbak, dadi yo dikongkon ngurus sek datae, terus engko lagek disinkronkan dengan pihak desa. Terus lek semisal anak.e wes lulus sekolah tapi sek ngarepno jenenge wong mbak kan yo enek seng ngandelno ngunuku, yo nanti kita omongi kalau bansos ini bukan gaji, dadi lek saman dikek.i yo kudu matur suwun lek gak di kek.i yo gak usah ngersulo, dadi kita menanamkan mindset mereka itu bahwa bantuan itu bukan gaji, bukan penghasilan tiap bulan yang kita nanti-nantikan wes ngunu tok intine kita menanamkan seperti itu. Terus lek semisal seng gak cair iki ternyata wong lansia utowo distabel ngunu yo mbak, dadi kene ngomong, dijelasno, diedukasi nang pihak keluarga dikandani, dijak ngurus nang beledoso untuk memperbaiki teru sengko ben dibenakno karo pihak deso akhire iso cair ngunu mbak

- Peneliti : Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan benar-benar membutuhkan atau tidak?
- Informan : Nek masalah butuh kabeh wong yo butuh mbak, kadang seng sugeh ae yo ngomong butuh sek.an sek njaluk. Dadi butuh.e iki mau tergantung karo kene kudu iso memilih dan memilah dadi yo tergantung pendampingne, dadi sekirane butuh yo memang dia membutuhkan sesuai dengan kriteria, kalau memang benar-benar tidak butuh yang kita graduasi, jadi KPM yang mendapatkan ini ya sudah sesuai membutuhkan mbak, dadi nek corolu yo iku wes butuh kabeh wonge
- Peneliti : Apakah masih ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang ada pada aturan atau kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)?
- Informan :. Dan untuk KPM yang mendapatkan bantuan ini sesuai karena otomatis dari komponen itu kan sebelumnya itu di crosscheck dan bantuan juga akan tersinkron dengan pusat, kalau semisal ada anak yang dulunya dapat layanan pendidikan terus sekarang sudah tidak memiliki komponen itu tentunya akan terputus dengan sendirinya, jadi ya kita omongi kalau anak sudah lulus saman juga akan lulus dari PKH ini, jadi lek menurutku yo sudah sesuai dan sudah tersinkron dengan pusat secara otomatis gitu mbak.
- Peneliti : Bagaimana dampak positif dengan danya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini?
- Informan : Program bantuan PKH ini sangat sekali membantu KPM mbak, karena KPM yang mendapatkan bantuan ini benar-benar orang yang membutuhkan, jadi tentunya yo iso mbak dapat membantu dalam kebutuhane mbak, opo maneh orang yang mendapatkan iki kan harus sesuai mbi komponen seng dimiliki mbak dadi yo tentunya sangat membantu tersebut. Karena bantuan PKH ini juga tentunya KPM seng oleh iki layanan sesuai dengan komponen sing dimiliki mbak, dadi yo seseorang tentunya dapat memantau kesehatannya atau dapat membiayai anaknya untuk sekolah tersebut mbak, ya sama lah sebagaimana seseorang juga dapat memantau atau periksa atau bisa menyekolahkan anak.e iku mau mbak. Terus iki mbak seng terpenting dari PKH ini ada pendampingan dalam mengubah mindset KPM tersebut mbak, itu sangat penting sekali, soale apa ya mbak biar KPM itu tidak selalu ketergantungan dengan bantuan seng dikekno mau mbak, soale yo iku mbak bantuan iki bukan gaji yang serta merta menjanjikan begitu mbak, jadi tentue sangat penting perubahan

mindset iki mbak. Dengan adanya bantuan PKH ini mbak juga tentunya dapat meminimalisir angka kemiskinan yang ada mbak, karena yo kan dia diberikan bantuan ya setidak e dapat digunakan dalam menunjang kebutuhannya itu mbak, yo sebagaimana tujuan PKH iki setidaknya digawe meminimalisir kemiskinan iki mbak.

- Peneliti : Bagaimana dampak negatif Program Keluarga Harapan (PKH) ini?  
Informan : Dengan adanya PKH ini yo isi menimbulkan kecemburuan sosial kepada PKM tersebut mbak, dadi yo seng oleh bantuan iki harus benar-benar sesuai agar tidak timbul kecemburuan sosial antar sesama. KPM juga terkadang mengharapkan bantuan seng dikei terus mbak, dadi yo iku mau perlu adanya mengubah mindset iki mau mbak, soale iki bukan gaji seng selalu terus menerus menjanjikan. Kadang seseorang kan gak podo yo mbak dadi yo biasane merintih njaluk bantuan ae akhire males kerjo, dadi sangat penting pendampingan pola mindset yang harus dilakukan pendamping untuk pihak KPM mbak.

### Transkrip Wawancara 3

Waktu Wawancara : 25 Maret 2023

Tempat Wawancara : Rumah KPM

#### Profil Informan

Nama : Ngatin  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Jabatan : PKM PKH Desa Sawo

#### Hasil Wawancara

Peneliti : Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa mendapatkan kemudahan informasi?  
 Informan : Iya mbak mudah lek ada informasi gitu.  
 Peneliti : Bagaimana cara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan informasi?  
 Informan : polae informasi iku dari pendamping biasae lewat wa, yo mendapatkan informasi terus mbak tapi terkadang kari oleh ngewocoku soale gak mesti buka terus kan mbak. Hampir jarang lah mbak lek teko pemerintah desa, kene lek pertemuan yo dilakukan nek rumah mbak gak nang balai desa, dadi seng lueh ngerti yoo pendamping iku mbak seng informasi ngunuku tapi sampek saiki wes gak tau ono pertemuan sek.an mbak.  
 Peneliti : Berapa cakupan yang bisa dijangkau oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan, transferan dana yang dirasakan?  
 Informan : Iya mbak wes mencakup ndue BPJS aku tapi gak pernah di gawe, terus sekolah iku oleh KIP tapi BPNT iki wes ga cair mbak 2 ulan iki.  
 Peneliti : Seberapa sering Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah?  
 Informan : Prosoku dalam setahun 4 opo 3 ngono mbak, eh 4 kali dalam 3 bulan sekali ngunu deh mbak, tapi terkadang yo molor ngunukun, pokok duek bantuan iki yo gae pembayaran anakku sekolah iki mbak.  
 Peneliti : Apakah pernah terjadi ketidaksesuaian pemberian yang dilakukan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?  
 Informan : Nang nek nggonku pasti cocok mbak oleh.e, kadang yo wong liyo yo ono seng kakean ono seng kurang, tapi tekku cocok terus.

- Peneliti : Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pernah mengetahui terjadinya bias yang dilakukan oleh pemerintah?
- Informan : Koyoke se iku mbak ono seng mampu oleh ono seng gak mampu oleh, mboh mbak ngunukun.
- Peneliti : Menurut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) apakah layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan yang diberikan pemerintah sudah tepat waktu?
- Informan : Iya mbak tepat waktu untuk layanan pendidikan, tapi terkadang bantuan duwek gawe bayar iki yo telat molor ngunu mbak.
- Peneliti : Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa bahwa pemerintah atau pendamping sudah menjalankan tugas untuk menyampaikan keluaran kebijakan?
- Informan : Sudah disampaikan yoo kumpulan pertemuan, sadurunge corona kae oleh yoo langsung kumpulan terus, tapi pas mari corona iki ga kumpulan blas sampek saiki durung, yo dikongkon ngefoto nang group ngunu ae nek wes oleh
- Peneliti : Menurut anda dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini apakah sudah membantu kebutuhan yang selama ini anda rasakan?
- Informan : Iya mbak, alhamdulillah sangat terbantu sekali bagi saya yang seperti ini mbak, pancine aku yo mek duwe omah iki mbak. Iya mbak oleh bantuan uang terus terkadang ya dapat sembako.
- Peneliti : Apakah masih ada warga di sini yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dikarenakan adanya kedekatan dengan pemerintah desa atau keluarga yang masih dianggap mampu?
- Informan : Yo nek sasaran nek kene yo masih ada mbak salah sasaran gitu mbak, tapi yo wis ono seng dicabut, pancine yo perlu dicabut, terus seng gandue diangkat mbak.
- Peneliti : Bagaimana dampak positif dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini?
- Informan : Iya mbak alhamdulillah tentunya sangat terbantu mbak dengan mendapatkan bantuan seperti ini, bantuan PKH iki mbak, yo iso digae bantu anakku sekolah iki mbak dibuat untuk biayanya, alhamdulillah mbak. Iya mbak aku oleh layanan pendidikan dadi yo iso di gawe biaya anak sekolah mbak, setidak e iso di gawe bantu lah mbak biaya bantuan iki mau.
- Peneliti : Bagaimana dampak negatif Program Keluarga Harapan (PKH) ini?



Informan : Yo iki mbak terkadang ono warga seng iri ngono mbak, polakno oleh bantuan, terus enek seng mampu tapi sek oleh seng gak mampu gak oleh ngunukan yo dibuat iri tetangga mbak.

### **Transkrip Wawancara 4**

Waktu Wawancara : 25 Maret 2023

Tempat Wawancara : Rumah KPM

#### **Profil Informan**

Nama : Tarmi  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Jabatan : PKM PKH Desa Sawo

#### **Hasil Wawancara**

Peneliti : Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa mendapatkan kemudahan informasi?

Informan : Eh yo iyo nak, dikei pengumuman yo biasane aku dikandani.

Peneliti : Bagaimana cara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan informasi?

Informan : yo biasane aku dikandani mbak ngatin iku nak laon iku sing parek omahku, nek kumpulan yo teko nak polae parek ae nek mbak ngatin iku ketua kelompok.e, nang biasane nek ole duek ngunukun langsung diterno rene nak laon ditompo wong liyo yo gak oleh kok. Lek informasi gak tau nak oleh teko kepala desa, yo kadang aku kringi tonggo ngunuku pemerintah desa ngerti nek durung cair barang yo teko kene nek takok ngunu nak, yo emboh nak ngunuku.

Peneliti : Berapa cakupan yang bisa dijangkau oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan, transferan dana yang dirasakan?

Informan : Seng wingi kae suwi nak gak diterno, polae wonge kawin terus gek diterno, aku yo due BPJS tapi yo gak tau nak tak gawe mugo-mugo ojo dikei gering polae gak ono sopo-sopo ngenekien.

Peneliti : Seberapa sering Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah?

Informan : Yo oleh bantuan nek ono, tapi ninganu yo gaono mboh ngunukun, yo yo wis ta nak ngunu ae, yo iki suwi nak dikek.i 200.000, terus gek tas wingi iki dikek.i 400.000 seng kae 20.000 terus kok gak metu suwe, bekne kok wes gak dikei tibak.e dikek.i 400.000 terakhir iki nak, nang emboh saiki kok sek gak dikei, pokoke yo jeke gang 3 bulan emboh nak wong tuwo yo janji tak trimo-trimo ae lek dikei.

- Peneliti : Apakah pernah terjadi ketidaksesuaian pemberian yang dilakukan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
- Informan : Yo emboh nak laon nek ngekek.i iku biasane ga podo ngunukuon tekku, aku wong tuo yo janji tak trimo, yo ono sisan seng luweh yo kurang ngunukun nak, eh yo emboh nak.
- Peneliti : Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pernah mengetahui terjadinya bias yang dilakukan oleh pemerintah?
- Informan : Nang bek ng kene nak yo ono seng wong duwe terus oleh maringunu seng gak nduwe yo gak oleh nak yo mboh ta nak ngunukun, nek aku yo janji tak trimo-trimo ae nak pancine aku wis tuwo ngeneken.
- Peneliti : Menurut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) apakah layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan yang diberikan pemerintah sudah tepat waktu?
- Informan : Yo aku iso nak nek prikso ngunukun, tapi yo gak tau tak gawe prikso yo mugo-mugo gak loro nak, yo polae aku ken ga ono sopo-sopo ngeneken nak, lek bantuan dikei duek yo maju mundur ngunukun nak gak pasti yo emboh nak.
- Peneliti : Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa bahwa pemerintah atau pendamping sudah menjalankan tugas untuk menyampaikan keluaran kebijakan?
- Informan : Lek aku yo orah dikandai, yo dikandani mbak ngatin iku biasane seng jupukno kau biasae tak kongkon jupukno yo iku, yo mbak ngatin ae seng biasane ngandani ono opo-opo ketua kelompok.e iku polahe nak
- Peneliti : Menurut anda dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini apakah sudah membantu kebutuhan yang selama ini anda rasakan?
- Informan : Iyo yo dikei terbantu ngunu nak , yo iku nak oleh duek, ninganu yo beras iku.
- Peneliti : Apakah masih ada warga di sini yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dikarenakan adanya kedekatan dengan pemerintah desa atau keluarga yang masih dianggap mampu?
- Informan : Ninganu yo ono seng suge-suge ngono yo ono seng oleh, nang ninganu seng gak nduwe yo gak oleh emboh ngunukun, ono seng oleh sak keluarga KK 2 sak njero omah oleh.
- Peneliti : Bagaimana dampak positif dengan danya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini?
- Informan : Iyo nak terbantu aku oleh bantuan iki nak, opo maneh bantuan iki kan yo oleh duek barang ngunu nak biasae, terus yo kadang oleh beras

ngunu se nak. Iyo nak aku yo oleh BPJS tapi yo gak tau tak gawe prikso nak, yo mugo-mugo ojo loro nak polae aku yo ijenan ngeneken.

Peneliti : Bagaimana dampak negatif Program Keluarga Harapan (PKH) ini?

Informan : Yo iki nak yo ono warga ninganu seng ngomong polakno ono seng oleh bantuan iki nak, yo emboh ngunukun nak, aku oleh yo tak trimo ngunu ae nak.

## **Transkrip Wawancara 5**

Waktu Wawancara : 27 Maret 2023

Tempat Wawancara : Rumah KPM

### **Profil Informan**

Nama : Mudaya  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Jabatan : PKM PKH Desa Sawo

### **Hasil Wawancara**

Peneliti : Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa mendapatkan kemudahan informasi?  
 Informan : Iya mbak mudah, informasi seng kene peroleh yo biasane iku dari ketua pendamping PKH iku mbak.  
 Peneliti : Bagaimana cara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan informasi?  
 Informan : Itu biasanya ada grup wa soale wong-wong sing oleh bantuan iku melbu grup kunu dadi siji terus ono informasi opo ngunu biasane dikandani lewat grup wa iku, biasane berapa bulan sekali yo ono kumpulan barang mbak nek ketua kelompok orah nek balai desa, tapi sai saiki sek durung ono kumpulan maneh yo dari wa itu, yo informasi disampaikan oleh pendamping iku tok mbak, gak sopo-sopo.  
 Peneliti : Berapa cakupan yang bisa dijangkau oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan, transferan dana yang dirasakan?  
 Informan : Iya mbak mendapat bantuan uang pendidikan, polae kau iki yo ndue anak siji mbak kelas 3 MTS, dadi oleh bantuan gae anakku seng sekolah iku langsung tak bayarno nang sekolahan.  
 Peneliti : Seberapa sering Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah?  
 Informan : Biasanya 3 bulan sekali, kadang ada apa gitu yo molor mbak bantunae, tapi sembako iki durung jare diganti uang ae tapi yo akeh seng durung metu.  
 Peneliti : Apakah pernah terjadi ketidaksesuaian pemberian yang dilakukan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?

- Informan : Enggak sih mbak, nek bantuanku yo pas terus sesuai mbak wesan, mboh yo mbak nek wong liyo aku gaeroh mbak.
- Peneliti : Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pernah mengetahui terjadinya bias yang dilakukan oleh pemerintah?
- Informan : Soale aku gak tau neliti, tapi terkadang yo krungu tonggo enek seng gak sesuai, tapi yo gak ngurusi terkadang wong liyo seng nduwe yo atine iri ngunukuwon mbak.
- Peneliti : Menurut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) apakah layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan yang diberikan pemerintah sudah tepat waktu?
- Informan : Iya tepat waktu mbak aku oleh layanan pendidikan dadi nek oleh yoo langsung tak gawe bayar nang sekolahane anakku, tapi seng bantuan duwek gae anakku yo kadang ono molore mbak.
- Peneliti : Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa bahwa pemerintah atau pendamping sudah menjalankan tugas untuk menyampaikan keluaran kebijakan?
- Informan : Untuk informasi mbak selalu ada, biasanya lewat group, nek kumpulan yo aku datang mbak
- Peneliti : Menurut anda dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini apakah sudah membantu kebutuhan yang selama ini anda rasakan?
- Informan : Alhamdulillah sudah terbantu mbak cukup, iya mbak dapat bantuan itu uang kadang yo sembako.
- Peneliti : Apakah masih ada warga di sini yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dikarenakan adanya kedekatan dengan pemerintah desa atau keluarga yang masih dianggap mampu?
- Informan : Lek masalah koyo bantuan gak sesuai nang wong sing bener-bener butuh opo gak, aku gak tau mbak lek masalah ngunu gak tau neliti soale, paling yo mek krungu tonggo-tonggo ngomong ngono ae mbak.
- Peneliti : Bagaimana dampak positif dengan danya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini?
- Informan : Alhamdulillah mbak terbantu, aku kan oleh PKH gae anakku seng sekolah itu mbak dadi yo lumayan iso di gawe bayar ngunu mbak, terus terkadang kan yo oleh BPNT barang ngunu iku mbak dadi yo terbantu mbak. Iya mbak dapat layanan pendidikan, jadi ya iso mbak digae bantu biaya anak ng sekolah mesti titik-titik ngunu mbak.
- Peneliti : Bagaimana dampak negatif Program Keluarga Harapan (PKH) ini?

Informan : Ya bisa menimbulkan kecemburuan ngono mbak, yo ono warga seng ngomong mbak, yo krungu-krungu ae soale aku yo gak tau neliti mbak seng oleh

### **Transkrip Wawancara 6**

Waktu Wawancara : 20 Maret 2023

Tempat Wawancara : Kantor Pemerintah Desa Dukunanyar

#### **Profil Informan**

Nama : Karno  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Jabatan : Kepala Desa Sawo

#### **Hasil Wawancara**

- Peneliti : Bagaimana kepala desa memberikan informasi untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
- Informan : Iya mbak saya rasa informasi yang disampaikan sudah cukup mudah untuk KPM.
- Peneliti : Bagaimana cara kepala desa dapat memberikan informasi dengan mudah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
- Informan : Dengan memanfaatkan media sosial wa, kita juga memastikan KPM punya nomor aktif. Ketika kita sudah memberikan informasi di wa tersebut kita juga akan melihat siapa yang sudah membaca, siapa yang belum, untuk yang belum melihat nanti tinggal bilangin lewat ketua RT atau kesra. Untuk pertemuan biasanya juga dilakukan di rumah KPM itu mbak, sangat jarang sekali kalau dilakukan di balai desa, tetapi saya juga selalu memberikan tempat apabila kalau mau melakukan pertemuan di balai desa ini.
- Peneliti : Berapa cakupan yang bisa dijangkau oleh pemerintah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan, transferan dana?
- Informan : Secara keseluruhan sudah mencakup semua untuk bantuan atau layanan yang diberikan kalau masalah KPM mendapatkan PKH itu mendapatkan KIS, kalau belum mendapatkan KIP atau KIS tentunya nanti kita bantu untuk membuatnya tapi itu semua sudah.
- Peneliti : Seberapa frekuensi pemberian bantuan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
- Informan : Kalau masalah sering tidaknya itu kan bantuan kan, dari segala bentuk bantuan tidak boleh ada yang double, jadi semisal mendapatkan bantuan PKH ya bantuan yang diterima oleh KPM harus berupa bantuan PKH itu saja, tidak boleh ada bantuan lainnya yang harus



- didapatkannya. Untuk bantuan PKH kita tidak tau tapi kan selalu ada ya 1 atau 3 bulan gitu
- Peneliti : Apakah pernah terjadi kesalahan sasaran untuk warga yang akan mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH)?
- Informan : InsyaAllah gak pernah salah sasaran, dulu pernah tetapi menurut saya itu bukan termasuk penyimpangan, karena roda kehidupan itu kan selalu berputar ya mbak, kadang di atas kadang di bawah begitu.
- Peneliti : Seberapa sering penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk Keluarga Program Keluarga Harapan (PKH)?
- Informan : Gak pernah salah sasaran, dulu pernah tetapi menurut saya itu bukan termasuk penyimpangan, karena roda kehidupan itu kan selalu berputar ya mbak, kadang di atas kadang dibawah begitu. Ya pernah mbak ada warga di sini yang mendapatkan ketika dia sudah mampu, terus dilanjudi oleh pihak pendamping untuk di survey langsung, ketika dia sudah benar-benar mampu maka akan dicopot untuk bantuannya akan diberitahu ke KPM, sedangkan orang yang ternyata tidak mampu tapi tidak mendapatkan juga langsung di survey oleh pihak pendamping untuk mengetahui keadaannya untuk diajukan, tapi tidak langsung bisa cair begitu mbak, harus melalui beberapa proses, soalnya kadang yang menjadi masalah ya bisa terkait administrasi itu yang sering terjadi mbak.
- Peneliti : Apakah layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah tepat waktu?
- Informan : Kalau kita tidak tahu tepat waktu atau tidak untuk layanan yang diberikan, karena ketika warga periksa kan baru mendapatkan, ketika tidak periksa ya tidak mendapatkan layanan yang ada di puskesmas itu mbak. InsyaAllah saya yakin dari pihak puskesmas sekarang nakes tidak ada yang membedakan, lain itu untuk yang ada di desa juga ada posyandu, pos polindes ketika ada warga yang mau periksa kan gratis. Dan untuk ketepatan layanan pendidikan ya tergantung dengan kebijakan sekolah semua PKH itu kayaknya mendapatkan KIP soalnya. Pokoknya desa hanya pengen memastikan bahwa si KPM bisa menerima apa yang diperoleh, kita pengen mengontrol siapa yang sudah mendapatkan apa yang menjadi haknya, kalau belum yang diberitahu.
- Peneliti : Apa yang dilakukan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?

- Informan : Ya itu tadi kita Cuma bisa bantu, kita tanya pendamping, kita koordinasi dengan pendamping solusinya permasalahannya apa, pokoknya permasalahannya apa ya kita bantu semaksimal mungkin gitu sih mbak.
- Peneliti : Apakah yang dapat diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memang membutuhkan atau tidak?
- Informan : Tapi sepengetahuan saya, ya sekarang sudah gak adasih yang mampu terus mendapatkan, karena informasi itu kita akan bekerjasama dengan pihak pemerintah desa kalau mampu ya kita laporkan mampu begitu, ada juga kok warga yang sudah mampu kita edukasi sehingga nanti bisa keluar dari bantuan PKH ini.
- Peneliti : Bagaimana dampak positif dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini?
- Informan : Alhamdulillah dengan adanya bantuan PKH ini karena yang mendapatkan memang sesuai jadi sangat merasa terbantu, untuk dapat memenuhi kebutuhan terkait bantuan yang diberikan tersebut mbak. Karena PKH ini yo dapat KIS terus KIP dan layanan sesuai dengan komponen yang dimilikinya, sehingga dia tersebut bisa untuk memantau kesehatannya maupun bisa memanfaatkan layanan yang diberikan sesuai dengan komponen yang dimilikinya, sebagaimana orang lain yang juga seperti itu mbak. Dengan adanya bantuan PKH ini juga tentunya ada dampak yang mana sudah tidak ada alasan lagi putus sekolah maupun negatif lainnya karena alasan pemasukan dan pengeluarannya yang tidak seimbang, karena dalam bantuan ini kan sudah diberikan entah ada beberapa layanan sesuai dengan komponen yang dimilikinya tersebut itu mbak, juga ada bantuan berupa yang lainnya itu sih mbak. Ini yang terpenting dalam bantuan PKH juga dalam pendampingan mindset PKM mbak, soalnya itu bukan gaji yang selalu menjanjikan mbak untuk setiap bulannya, jadi supaya KPM tidak ketergantungan dengan adanya bantuan yang diperolehnya. Bantuan ini juga digunakan untuk meminimalisir angka kemiskinan yang tinggi juga mbak, sesuai dengan tujuan yang ada tersebut dalam bantuan ini.
- Peneliti : *Bagaimana dampak negatif Program Keluarga Harapan (PKH) ini?*
- Informan : Timbul kecemburuan sosial kepada masyarakat yang tidak, sehingga perlu orang yang betul-betul sesuai untuk mendapatkan bantuan ini karena agar tidak timbulnya kecemburuan sosial yang ada. Biasanya selalu mengharapkan bantuan yang sudah diberikan, dadi biasane yo nek bantuan telat yo ngunuku mau mbak, soalnya dia sudah

mengharapkan bantuan yang sudah diberikannya mbak. Dengan adanya bantuan ini juga biasanya bisa menjadikan seseorang malas bekerja dan merintih untuk meminta bantuan karena menggantungkan bantuan yang diberikan mbak. Permasalahannya juga terkait sistem dan kependudukan yang memiliki perbedaan mbak soale kadang nggae KK lama atau NIK double itu juga bisa dapat jadi permasalahan mbak, sehingga bantuan yang diberikan tidak sesuai.

## **Transkrip Wawancara 7**

Waktu Wawancara : 23 Maret 2023

Tempat Wawancara : Rumah KPM

### **Profil Informan**

Nama : Jamiludin

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Pendamping PKH Desa Dukunanyar

### **Hasil Wawancara**

Peneliti : Bagaimana cara pendamping dalam menyampaikan informasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?

Informan : Dengan cara melakukan pertemuan kelompok itu yang biasanya kita lakukan dengan yang lainnya

Peneliti : Bagaimana pendamping dalam memberikan informasi dengan mudah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?

Informan : untuk melakukan pertemuan biasanya kita melakukannya di balai pertemuan atau balai desa, bisa juga di rumah KPM tapi lebih banyak di rumah KPM seh mbak tergantung dengan kondisinya, nah kadang begini mbak kalau sifatnya ada informasi yang disampaikan oleh kepala desa, kita mau gak mau harus melakukan pertemuan di balai desa tersebut gitu mbak. Untuk memberikan informasi yang mudah ditangkap oleh KPM biasanya lewat pertemuan secara langsung, bisa juga menggunakan VDS itu lewat video mbak, soale kadang terkait kesehatan, pendidikan ngunuku biasane enek video yoopo tentang kesehatan kaya gitu mbak, lah nanti kita tayangkan videonya, jadi ya seringnya kita melakukan pertemuan secara langsung begitu mbak.

Peneliti : Berapa cakupan yang bisa dijangkau oleh pendamping untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan, transferan dana?

Informan : Kalau masalah pendidikan, kesehatan kaya gitu insyaAllah sudah terpenuhi mbak sesuai dengan kriteria kalau kesehatan kan termasuk untuk ibu hamil kemudian anak usia dini, kalau pendidikan kan dimulai dari SD sampai SMA, sedangkan lagi terkait kesejahteraan sosial kan untuk lansia dan disabilitas tersebut, lah ada lagi kalau untuk masalah jumlah bantuan ya tentu sesuai dengan komponen-komponen tersebut

kalau punya satu lansia ya nanti menerimanya ya lansia itu saja semuanya juga sesuai.

Peneliti : Seberapa frekuensi pemberian bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?

Informan : Ya sesuai dengan aturan berarti 1 tahun 4 kali untuk pencairannya, lah biasanya itu untuk triwulan pertama bulan januari, february, maret untuk triwulan kedua april, mei, juni dan seterusnya mbak.

Peneliti : Apa yang dapat dilakukan oleh pendamping jika terjadi penyimpangan yang dilakukan?

Informan : Kalau semisal ada warga mampu dan mendapatkan penyimpangan terkait hal tersebut itu biasanya akan di graduasi, yang bisa ya kita laporkan sehingga kedepannya agar tidak dapat bantuan kembali gitu, karena memang warga tersebut sudah mampu, tetapi kalau terkait calon pertama PKH awal biasanya kan ada calon awal penerima PKH itu kita bekerjasama dengan pemerintah desa untuk melakukan validasi data tersebut, kita validasi data-data tersebut siapa yang layak atau tidak, jika ada yang mampu maka kita laporkan kalau mampu sehingga tidak mendapatkan bantuan PKH tersebut. Tetapi kalau di tengah perjalanan waktu dulu awalnya mendapatkan PKH tidak mampu, kemudian seiring berjalannya waktu dalam jangka waktu satu tahun atau berapa gitu dia mampu ya nanti akan di graduasi untuk kita laporkan bahwa dia sudah mampu.

Peneliti : Apakah layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah tepat waktu?

Informan : Kalau masalah terkait layanan sudah tepat waktu, karena kita juga bisa bekerjasama dengan pihak puskesmas dan juga tenaga pendidikan, bagaimana warga itu anak-anaknya yang sekolah ya bisa sekolah bisa mengenyang pendidikan kaya anak yang lainnya, kalau dengan anak balita atau ibu hamil ya kita dorong warga tersebut agar dia dapat melakukan pemantauan atau pemeriksaan sehingga tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Ya tapi terkadang itu mbak kan ya namanya warga gitu ya ada ada aja yang tidak memeriksakan pada layanan kesehatan atau dalam layanan pendidikan terkadang anaknya tidak sekolah, padahal itu semua sudah disediakan oleh pemerintah dengan adanya layanan-layanan tersebut soale kadang warga kan juga ada kesibukannya jadi tidak ikut imunisasi atau lainnya atau kadang anak-anak itu tidak sekolah tapi yo nggak yang sering gitu, tetapi di lain waktu dia masih ikut lagi.

- Peneliti : Apa hak-hak yang dapat diperoleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH)?
- Informan : Terkait hak-hak yang dapat diterima oleh PKM ya dia mendapatkan pendampingan, layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, nek bantuan yo wes pasti diterima.
- Peneliti : Apa yang dapat dipertanggungjawabkan pendamping kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
- Informan : Kalau semisal terkait bantuan yang molor lagi-lagi itu kan kebijakan dari pusat ya, ya kita mengikuti apa yang menjadi instruksi dari sana, kalau cair ya kita sampaikan, kalau ada moloran kita edukasi ke KPM dan menjelaskan bahwa ini bantuan sosial bukan gaji, jika tidak serta merta menjanjikan. Kalau semisal terjadi ketidak sesuaian data ya nanti kita akan kerjasama dengan stakeholder, dan menyuruh kepada KPM untuk memperbaiki datanya. Sehingga kedepannya bantuan tersebut sesuai tidak berbeda lagi.
- Peneliti : Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan benar-benar membutuhkan atau tidak?
- Informan : Untuk warga yang mendapatkan ini memang sudah benar-benar membutuhkan dan sudah sesuai.
- Peneliti : Apakah masih ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang ada pada aturan atau kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)?
- Informan : Nggak ada, karena sejak awal calon yang mendapatkan itu sudah kita lakukan untuk validasi terlebih dahulu, sehingga yang mampu kita laporkan mampu. Dengan seiring berjalannya waktu kalau ada KPM yang membaik kita akan laporkan melakukan graduasi mampu, maka sebisa mungkin lah dengan permasalahan-permasalahan itu kita selesaikan dan juga meminimalisir biar tidak ada kecemburuan sosial. Tapi sepengetahuan saya, ya sekarang sudah gak adasih yang mampu terus mendapatkan, karena informasi itu kita akan bekerjasama dengan pihak pemerintah desa kalau mampu ya kita laporkan mampu begitu, ada juga kok warga yang sudah mampu kita edukasi sehingga nanti bisa keluar dari bantuan PKH ini.
- Peneliti : Bagaimana dampak positif dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini?
- Informan : Tentunya pihak PKM sangat terbantu dengan adanya bantuan yang diberikan tersebut mbak, untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya bantuan ini, KPM yang mendapatkan tentunya juga

mendapatkan akses seperti layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial mbak. Jadi layanan tersebut bisa dimanfaatkan. Ini yang terpenting dalam bantuan PKH juga dalam pendampingan mindset PKM mbak, soalnya itu bukan gaji yang selalu menjanjikan mbak untuk setiap bulannya, jadi supaya KPM tidak ketergantungan dengan adanya bantuan yang diperolehnya. Juga digunakan untuk meminimalisir angka kemiskinan yang tinggi mbak, dengan adanya bantuan ini KPM dapat memenuhi kebutuhannya mbak.

Peneliti : Bagaimana dampak negatif Program Keluarga Harapan (PKH) ini?  
Informan : Ya biasanya timbul kecemburuan masyarakat karena ada bantuan yang diberikan itu mbak. Dampak yang sering terjadi untuk bantuan PKH yo iki mbak, KPM terkadang belum mendapatkan ATM nya karena adanya gagal burekol, terkadang ya namanya tidak terbaca gitu mbak. Negatif lainnya juga ini mbak yang sering terjadi itu kasuistik antara nama dengan sistem yang berbeda itu juga sering terjadi mbak.

### **Transkrip Wawancara 8**

Waktu Wawancara : 29 Maret 2023  
Tempat Wawancara : Rumah Ketua KPM PKH

#### **Profil Informan**

Nama : Muhibatul Maulidah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jabatan : PKM PKH Desa Dukunanyar

#### **Hasil Wawancara**

Peneliti : Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa mendapatkan kemudahan informasi?  
Informan : Ya mbak sudah dengan mudah.  
Peneliti : Bagaimana cara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan informasi?  
Informan : Ya, kan ada kelompoknya, jadi ada informasi yang ada ada itu sudah ada di kelompok group wa itu mbak dikandani pendamping kan sudah satu group ada pendamping kadang nek ono seng gak eroh yo teko ketua kelompok.  
Peneliti : Berapa cakupan yang bisa dijangkau oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan, transferan dana yang dirasakan?  
Informan : Masih belum merata mbak untuk mencakup BPNT belum cair, kalau seperti layanan kesehatan sudah mendapatkan, tapi aku duwe anak gak oleh mbak gae pendidikan KIP itu.  
Peneliti : Seberapa sering Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah?  
Informan : 3 bulan sekali dalam setahun, peng 4 lah kadang iku januari, maret pokok 3 bulan sekali untuk tanggalnya maju mundur.  
Peneliti : Apakah pernah terjadi ketidaksesuaian pemberian yang dilakukan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?  
Informan : Lek bantuan yang diberikan mesti sesuai seh mbak, kalau disini sudah sesuai semua seh mbak, sudah nggak ada yang mampu dikasih gitu gak ada mbak.  
Peneliti : Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pernah mengetahui terjadinya bias yang dilakukan oleh pemerintah?



- Informan : sudah layak semua seh mbak warga seng mendapatkan di sini.
- Peneliti : Menurut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) apakah layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan yang diberikan pemerintah sudah tepat waktu?
- Informan : Bisa dilayani tepat waktu mbak, lek semisal perikso loro ngunu, nggak ada yang dibedakan, tapi nek oleh bantuan teko PKH iki yo waktue kadang ga sesuai mbi waktue mbak kan seng di gawe lapo ngunu mbak. Yoo wes gak ono absen gae kene nganu layanan iku, yo opo jare kene lek aku.
- Peneliti : Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa bahwa pemerintah atau pendamping sudah menjalankan tugas untuk menyampaikan keluaran kebijakan?
- Informan : Iya sudah menyampaikan, lewat hp.an, kalau ketemu langsung yo bisa mengutarakan opo sing kene konok.i ngono mbak.
- Peneliti : Menurut anda dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini apakah sudah membantu kebutuhan yang selama ini anda rasakan?
- Informan : Ya alhamdulillah ya sudah mbak, ya bisa digunakan tambahan biaya sekolah meskipun kurang mbak, digae titik-titik mbak opo maneh aku bien ngontrak gak ndue omah, saiki mbak wong ngenggoni omah.e wong tuo ku.
- Peneliti : Apakah masih ada warga di sini yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dikarenakan adanya kedekatan dengan pemerintah desa atau keluarga yang masih dianggap mampu?
- Informan : Lek saiki mbak nek dekne merasa mampu ngunukun ditangani, rasane tau oleh mbak terus kok wes ndue yo akhire gak oleh, ono seng gak nduwe yo oleh mbak akhire. Soale kabeh KK kan diserahno mbak, seng tau kene yo pemerintah kunu, dadi seng oleh-oleh iki kan wes pilihan mbak.
- Peneliti : Bagaimana dampak positif dengan danya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini?
- Informan : Iya mbak kami sangat terbantu tentunya dengan adanya bantuan yang diberikan mbak, soale yo iso digae anakku sekolah barang, aku yo omah ilu wong tuwo ngeneken mbak dadi yo terbantu mbak. Terus yo kene iki mbak oleh sisan layanan sesuai komponen kene, dadi yo iso digae anakku sekolah iku mbak.
- Peneliti : Bagaimana dampak negatif Program Keluarga Harapan (PKH) ini?
- Informan : Yo biasane enek warga mbak seng ngomong-ngomong mbak lek oleh bantuan ngunu iku.

## Transkrip Wawancara 9

Waktu Wawancara : 31 Maret 2023

Tempat Wawancara : Rumah KPM

### Profil Informan

Nama : Masrifah  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Jabatan : PKM PKH Desa Dukunanyar

### Hasil Wawancara

Peneliti : Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa mendapatkan kemudahan informasi?  
 Informan : Iya mbak mudah lek dapat informasi ngunukun.  
 Peneliti : Bagaimana cara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan informasi?  
 Informan : Soale yo kan wes enek group wa kan mbak dadi langsung dikandani pendamping nek group kunu kan nek njero group yowes enek pendamping mau, yo mek iku tok informasi seng kene peroleh, saiki sek durung lek ono pertemuan ngunuku.  
 Peneliti : Berapa cakupan yang bisa dijangkau oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan, transferan dana yang dirasakan?  
 Informan : Yo sek kadang durung iso mencakup kabeh mbak soal ngeneken yo biasane oleh beras nang emboh mbak gak dapet, terus BPNT yo masih belum cair.  
 Peneliti : Seberapa sering Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah?  
 Informan : Yo dalam setahun iku mbak dapet peng 4, pokoke 3 bulan sekali ngunukun oleh, tapi kadang yo gak mesti mbak waktue soale yo maju mundur ngunukun.  
 Peneliti : Apakah pernah terjadi ketidaksesuaian pemberian yang dilakukan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?  
 Informan : Sudah sesuai mbak untuk bantuan yang diberikan jumlah.e.  
 Peneliti : Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pernah mengetahui terjadinya bias yang dilakukan oleh pemerintah?  
 Informan : Gak ada seh mbak kayak.e wesan, yowes sesuai kabeh koyok.e mbak.

- Peneliti : Menurut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) apakah layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan yang diberikan pemerintah sudah tepat waktu?
- Informan : Iya mbak wes tepat waktu, tapi kadang bantuan duwek seng dikei iki mau yo telat ngunukuwon.
- Peneliti : Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa bahwa pemerintah atau pendamping sudah menjalankan tugas untuk menyampaikan keluaran kebijakan?
- Informan : Iya mbak semua informasi apapun dari atasan iku selalu dikandani ambi pendamping iku mbak lewat wa group iku.
- Peneliti : Menurut anda dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini apakah sudah membantu kebutuhan yang selama ini anda rasakan?
- Informan : Iya alhamdulillah mbak sangat terbantu sekali dengan keadaan saya yang seperti ini mbak.
- Peneliti : Apakah masih ada warga di sini yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dikarenakan adanya kedekatan dengan pemerintah desa atau keluarga yang masih dianggap mampu?
- Informan : . Lek nek warga Desa Dukunanyar seng oleh PKH iki koyok.e yo wes sesuai se mbak jekene.
- Peneliti : Bagaimana dampak positif dengan danya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini?
- Informan : Lek dulu yo ini mbak sering kaya banyak yang ngomong soale gak sesuai ngunuku mbak, tapi saiki kan wes dipedot dadi y owes ga sepiro wong ngomong lek ono bantuan ngunuku mbak.
- Peneliti : Bagaimana dampak negatif Program Keluarga Harapan (PKH) ini?
- Informan : Lek dulu yo ini mbak sering kaya banyak yang ngomong soale gak sesuai ngunuku mbak, tapi saiki kan wes dipedot dadi yowes gak sepiro wong ngomong lek ono bantuan ngunuku mbak”.

## Transkrip Wawancara 10

Waktu Wawancara : 1 April 2023

Tempat Wawancara : Rumah Ketua KPM PKH

### Profil Informan

Nama : Kholifah  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Jabatan : PKM PKH Desa Dukunanyar

### Hasil Wawancara

Peneliti : Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa mendapatkan kemudahan informasi?  
 Informan : Ya alhamdulillah mudah nak.  
 Peneliti : Bagaimana cara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan informasi?  
 Informan : Yo lewat hp ngunukun seng gabung itu anakku nak dadi engko aku dikandani anakku nek enek pengumuman opo ngunu nak, kulo mboten saget hp.an wong tuwo nak yo anakku mau seng lebu group, yo nek kumpulan oleh lansia ngunukun dikandani nak. biasae pemerintah desa ngerti durung cair opo seng lain iku ono wong seng takok ngunu nak lagek ngerti lek enek masalah durung cair opo seng lain ngunu nak  
 Peneliti : Berapa cakupan yang bisa dijangkau oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan, transferan dana yang dirasakan?  
 Informan : Yo iku setiap ono apane ikuloh op arane, bantuan duek ngunukun mesti oleh, nang saiki iki mboh nak kok wes gak oleh beras padahal biasane iku oleh nak.  
 Peneliti : Seberapa sering Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah?  
 Informan : PKH ku wes balek-balek arane oleh PKH, maringunu gak oleh PKH terus saiki oleh lansia, lek bantuane iku biasane setahun ping 4.  
 Peneliti : Apakah pernah terjadi ketidaksesuaian pemberian yang dilakukan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?  
 Informan : Gak pernah nak, yo tetep sak kek.an oleh 600.000.  
 Peneliti : Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pernah mengetahui terjadinya bias yang dilakukan oleh pemerintah?

- Informan : Nek saiki nek deso kene nak koyok.e gak ono, polae akeh wesang sengk saiki dicabut, saiki wes dipilih kabeh sengk entok iki nak.
- Peneliti : Menurut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) apakah layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan yang diberikan pemerintah sudah tepat waktu?
- Informan : Aku kan PKH lansia yo nak, yo selain oleh duwek lansia iku, biasane oleh beras mboh ulan iki, tapi saiki gak oleh mboh kok jarang wes gak cair 3 bulan iki. Yo gaono daftar hadir gae kene semisal prekso yo gak ono mbak pokok kene yo sg nganu dewe lek semisal kudu prekso ta lapo ngunu.
- Peneliti : Apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa bahwa pemerintah atau pendamping sudah menjalankan tugas untuk menyampaikan keluaran kebijakan?
- Informan : Iyo nak lewat hp ngunuku, biasane dikandani anakku nek ono pemberitahuan opo ngunu terus yo kumpulan iki nang emboh iki kok sek durung kumpulan, terus iku mesti diumumkan.
- Peneliti : Menurut anda dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini apakah sudah membantu kebutuhan yang selama ini anda rasakan?
- Informan : Alhamdulillah, butuh sekali engko oleh ngunu kanggo anakku njaluk terusno sekolah ngunu, di gawe tuku beras, LPG iku mesti, polae wedok-wedok bapake wes gak ono oleh bantuan alhamdulillah kenek di gawe kebutuhan.
- Peneliti : Apakah masih ada warga di sini yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dikarenakan adanya kedekatan dengan pemerintah desa atau keluarga yang masih dianggap mampu?
- Informan : Lek warga nek kene sengk oleh PKH koyok.ane ono yo sengk duwe terus oleh surat saiki wes gaoleh dicabut saiki wes dipilih.i gak oleh kabeh.
- Peneliti : Bagaimana dampak positif dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini?
- Informan : Nek dampak yo iki nak kene yo terbantu nak, yo iso di gawe keperluan, polae koyo LPG barang ngono mesti nak yo terbnatu nak. Yo oleh iku nak opo aku ken oleh PKH lansia iku nak dadi oleh duwek 600.000 3 ulan pisan iku nak.
- Peneliti : Bagaimana dampak negatif Program Keluarga Harapan (PKH) ini?
- Informan : Yo biasa tonggo ngomong mbak lek ono warga sugih nang sengk di kek.i ngono, tapi saiki kan wes gaono mbak dadi yowes gak sepiro mbak ngomong-ngomong

*Lampiran 3***DOKUMENTASI WAWANCARA**

1. **Wawancara dengan Bapak Karno selaku kepala Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik**



2. **Wawancara dengan Bapak Muslih selaku kepala Desa Dukunanyar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.**



3. Wawancara dengan Bapak Syaiful Arif selaku pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.



4. Wawancara dengan Bapak Jamiludin selaku pendamping Program Keluarga Harapan Desa Dukunanyar



**5. Wawancara dengan Ibu Ngatin selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sawo**



**6. Wawancara dengan Ibu Tarmi selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sawo**





**7. Wawancara dengan Ibu Mudaya selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sawo.**



**8. Wawancara dengan Ibu Muhibatul Maulidah selaku Keluarga penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Dukunanyar**



**9. Wawancara dengan Ibu Masrifah selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Dukunanyar**



**10. Wawancara dengan Ibu Kholifah selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Dukunanyar**



## Lampiran 4

## SURAT KETERANGAN IZIN RISET

 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.  
Gedung F.101, Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60115)  
Telp. 031 5925962, 5931800 psw. 159 e-mail : fisp@untag-sby.ac.id

Surabaya, 14 Maret 2023

Nomor : 968K/FISIP/III/2023  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Proposal  
Perihal : **Pemohonan Ijin Observasi**

Kepada Yth. : Kepala Desa Sawo  
Desa Sawo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.  
Berkemauan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Nurul Islamiyah (1111900177)	Jl. Banyu Arang RT.014 RW.004 Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik	81615228759


Guna melakukan pengambilan data di :  
"Desa Sawo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik"

Dengan judul Skripsi: "Evaluasi Pemersos No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Banding di Desa Sawo dan Dukunanyar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Jawa Timur)"

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kejasamanya disampaikan terimakasih.

  
Dr. Daryun Maduwinarti, MP  
NIP. 19420187 0103

Tembusan :

 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.  
Gedung F.101, Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60115)  
Telp. 031 5925962, 5931800 psw. 159 e-mail : fisp@untag-sby.ac.id

Surabaya, 14 Maret 2023

Nomor : 966K/FISIP/III/2023  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Proposal  
Perihal : **Pemohonan Ijin Observasi**

Kepada Yth. : Kepala Desa Dukunanyar  
Jl. Dukun Anyar No. 15, Dukunanyar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik


Dengan hormat,  
Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.  
Berkemauan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Nurul Islamiyah (1111900177)	Jl. Banyu Arang RT.014 RW.004 Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik	81615228759

Guna melakukan pengambilan data di :  
"Desa Dukunanyar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik"

Dengan judul Skripsi: "Evaluasi Pemersos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Banding di Desa Sawo dan Dukunanyar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Jawa Timur)"



Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kejasamanya disampaikan terimakasih.

  
Dr. Daryun Maduwinarti, MP  
NIP. 19420187 0103

Tembusan :

## Lampiran 5

## SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK</b>  <b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>  <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>          J. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 0811-3050-7778          Website : <a href="http://bappeda.gresikkab.go.id">http://bappeda.gresikkab.go.id</a> email : <a href="mailto:bappeda@gresikkab.go.id">bappeda@gresikkab.go.id</a>  <b>G R E S I K</b></p>		
Nomor	: 070 / 271 / 437.71 / 2023	Gresik, 03 Mei 2023
Sifat	: Penting	Kepada
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas	Yth Dekan
Perihal	: Rekomendasi Izin Penelitian / Survey/Riset/KKN/PKL	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
<p><b>Dasar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik</li> <li>Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik</li> <li>Surat dari Dekan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor: 968/K/FISIP/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 Perihal Permohonan Ijin Penelitian</li> </ol> <p>Maka dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik menyatakan tidak keberatan atas dilakukannya kegiatan yang dilakukan oleh</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama : Nurul Islamiyah</li> <li>NIM/ NIK/ NIDN : 3525016705010002</li> <li>Pekerjaan : Mahasiswa</li> <li>Alamat : Lowayu Rt. 014 Rw : 004 Kec. Dukun Kab. Gresik</li> <li>Keperluan dilakukannya : Untuk melaksanakan Penelitian dengan judul "Evaluasi Permessos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memangulangi Kemiskinan (Studi Banding di Desa Sawo dan Dukunanyar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Jawa Timur)"</li> <li>Tempat melakukan Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/ PKL : Desa/ kel Sawo</li> <li>Waktu Pelaksanaan Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/ PKL : 08 Mei 2023 - 30 Juni 2023</li> <li>Peserta/ Pengikut :</li> </ol>		
<p>Dalam melakukan kegiatan Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sebelum dan setelah dilaksanakannya Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL diwajibkan melapor kepada Instansi terkait;</li> <li>Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan lain diluar kegiatan Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/ PKL yang dilakukan;</li> <li>Setelah melakukan Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL selambat - lambatnya 1 (satu) bulan agar menyerahkan 1 (satu) ex / buku hasil Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL kepada Bupati Gresik melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik;</li> <li>Dalam pelaksanaan wajib mematuhi Protokol Kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.</li> </ol> <p>Demikian rekomendasi ijin Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.</p> <p style="text-align: center;"><b>An.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,          PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN          KABUPATEN GRESIK          Kabid Riset dan Inovasi Daerah</b></p> <div style="text-align: center;">  <p><b>NUR SAMSI, SE, M.S.A.</b>          Pembina          NIP. 19710331 200604 1 014</p> </div> <p>Tembusan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</li> <li>Desa/ kel Sawo</li> </ol>		



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
 Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 0811-3050-7778  
 Website : <http://bappeda.gresikkab.go.id> id email : [bappeda@gresikkab.go.id](mailto:bappeda@gresikkab.go.id)  
**G R E S I K**

Nomor	: 070 / 280 / 437.71 / 2023	Gresik, 05 Mei 2023
Sifat	: Pening	Kepada
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas	Yth Dekan FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Perihal	: Rekomendasi Izin Penelitian/ Survey/Riset/KKN/ PKL	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Dasar**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
2. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
3. Surat dari Dekan FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor: 968/K/FISIP/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian

Maka dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik menyatakan tidak keberatan atas dilakukannya kegiatan yang dilakukan oleh

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. Nama   | : | Nurul Idamiyah  |
| 2. NIM/ NIK/ NIDN   | : | 3525016705010002  |
| 3. Pekerjaan  | : | Mahasiswa   |
| 4. Alamat   | : | Lowayu Rt: 014 Rw : 004 Kec. Dukun Kab. Gresik  |
| 5. Keperluan dilakukannya Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/ PKL | : | Untuk melaksanakan Penelitian dengan judul "Evaluasi Permessos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Banding di Desa Sawo dan Dukunmyar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Jawa Timur)" |
| 6. Tempat melakukan Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/ PKL       | : | Desa/ke/ Dukun Anyar  |
| 7. Waktu Pelaksanaan Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/ PKL      | : | 08 Mei 2023 - 30 Juni 2023  |
| 8. Peserta/ Pengikat  | : |   |

Dalam melakukan kegiatan Penelitian/Survey/Riset/KKN/ PKL agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum dan setelah dilaksanakannya Penelitian/Survey/Riset/KKN/ PKL diwajibkan melapor kepada Instansi terkait;
2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan lain diluar kegiatan Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/ PKL yang dilakukan;
3. Setelah melakukan Penelitian/Survey/Riset/KKN/ PKL selambat - lambatnya 1 (satu) bulan agar menyerahkan 1 (satu) ex. / buku hasil Penelitian/Survey/Riset/KKN/ PKL kepada Bupati Gresik melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik;
4. Dalam pelaksanaan wajib mematuhi Protokol Kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Demikian rekomendasi izin Penelitian/Survey/Riset/KKN/ PKL ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**An.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
 KABUPATEN GRESIK  
 Kabid Riset dan Inovasi Daerah**




**NUR SAMSI, SE, MSA**  
 Pembina  
 NIP. 19710331 200604 1 014

**Tembusan**

1. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2. Desa/ke/ Dukun Anyar

Lampiran 6


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Program Studi : Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi  
 • Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi  
 Gedung F 101, Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisp@untag-sby.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nurul Islamiyah  
 NBI : 1111900177  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Dosen Pembimbing I : Drs. Radjikan, M.Si  
 Dosen Pembimbing II : Dra. Indah Indartuti, M.Si  
 Judul Skripsi : **EVALUASI OUTPUT KEBLAKAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI KEKURANGAN (Studi Bermaning di Desa Sawo Dan Dukunanyar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Jawa Timur)**

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dosen 1	Paraf Dosen 2
1	13 Feb 2023	Bab I, Revisi sesuai arahan	<i>[Signature]</i>	
2	14 Feb 2023	Bab I. ACC. Bab II. Absahen Terori & kerusuhan Bab II - pncet formatua siphone	<i>[Signature]</i>	
3	27/02/23	Bab II - acc. bab vii. ddo	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	27/2	Bab II - III. ACC. (Membaca & Xerox) Bab III → 2 buat / format perbaikan	<i>[Signature]</i>	
5	9/3/2023	- Rgsm. Usmancaan di cek kembali	<i>[Signature]</i>	
6	3/4	Bab IV : acc Hub. Dayam I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	6/4	Bab IV. Jaring jala pncet Revisi perbaikan	<i>[Signature]</i>	



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Program Studi : Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi  
 • Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi  
 Gedung F 101, Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisp@untag-sby.ac.id

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dosen 1	Paraf Dosen 2
8	13/23	Bab IV - ACC.	<i>[Signature]</i>	
9	2/5/23	Bab V acc. Hub. Dayam I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
10	3/5/23	Bab I & II ACC.	<i>[Signature]</i>	

Catatan:  
 1. Kartu Bimbingan dibawa saat bimbingan  
 2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing  
 Bimbingan dinyatakan selesai setelah  
 Tanggal: 15 Mei 2023...  
 Dosen Pembimbing I: *[Signature]*  
 Dosen Pembimbing II: *[Signature]*


## Lampiran 7

### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH



COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA  
DEPARTEMEN PENERBITAN

**PRAJA Observer: JURNAL PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK**  
e-ISSN: 2797-0489, Jl. Nginden Intan Timur XV, No. 11 Surabaya, Indonesia  
<https://www.aksilogi.org/index.php/praja/index>, e-mail: [prajajurnal@gmail.com](mailto:prajajurnal@gmail.com)



---

**PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik**  
7/05/2023/#990  
L.o.A  
18/05/2023

Kepada  
**NURUL ISLAMIYAH**  
[nurulislamiyah833@gmail.com](mailto:nurulislamiyah833@gmail.com);  
**RADJIKAN**  
[radjikan@untag-sby.ac.id](mailto:radjikan@untag-sby.ac.id);  
**INDAH MURT**  
[indah@untag-sby.ac.id](mailto:indah@untag-sby.ac.id);

Di  
Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

**INDONESIA**




Sehubungan dengan naskah artikel ilmiah yang saudara kirimkan ke redaksi jurnal PRAJA Observer, maka dengan ini redaksi informasikan bahwa naskah anda telah diproses untuk publikasi di Jurnal PRAJA Observer. Redaksi sangat mengapresiasi kontribusi naskah anda ke jurnal PRAJA Observer. Dan redaksi telah mengambil keputusan mengenai pengajuan naskah berjudul: **EVALUASI PERMENSOS NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN (Studi Banding di Desa Sawo dan Dukunayar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Jawa Timur)**, yang diterbitkan pada bulan Mei Tahun 2023; Volume 3, No. 03 (2023).

Dengan keputusan redaksi adalah: "DITERIMA"

Hormat kami,

---

Editor in Chief,  
**Kusnan**  
PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik



COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA  
DEPARTEMEN PENERBITAN

**PRAJA Observer: JURNAL PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK**  
e-ISSN: 2797-0489, Jl. Nginden Intan Timur XV, No. 11 Surabaya, Indonesia  
<https://www.aksilogi.org/index.php/praja/index>, e-mail: [prajajurnal@gmail.com](mailto:prajajurnal@gmail.com)



---

<https://www.aksilogi.org/index.php/praja/index>





*Lampiran 7***PERINTAH REVISI**

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

---

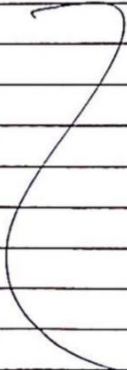
**LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI**

Nama : Nurul Islamiyah

NIM : 1111900177

Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 31 Mei 2023 WIB

Catatan Perbaikan:



Surabaya, 31 Mei 2023  
Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan,



Drs. Radjikan, M.Si

Revisi dari Dosen Penguji 1,



Drs. Radjikan, M.Si

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

### LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Nurul Islamiyah  
NIM : 1111900177  
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 31 Mei 2023 WIB

Catatan Perbaikan:

*dikoreksi, dasar ya ada.*

Surabaya, 06 Juni 2023  
Persetujuan Dosen Penguji 2 Telah Revisi/Perbaikan,



Drs. Supri Hartono, M.Si

Revisi dari Dosen Penguji 2,



Drs. Supri Hartono, M.Si

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

### LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Nurul Islamiyah  
 NIM : 1111900177  
 Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 31 Mei 2023 WIB


Catatan Perbaikan:

1. Studi kasus bukan studi banding: Robert K. Tim
2. Baugyet Tjro
3. Pembahasan masih kurang, Pakei Bab 2
4. Buat transkrip wawancara
5. Kesimpulan disesuaikan dengan kesimpulan

Surabaya, 31 Mei 2023  
 Persetujuan Dosen Penguji 3 Telah Revisi/Perbaikan,

  
 Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP

Revisi dari Dosen Penguji 3,

  
 Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

*Lampiran 8***HASIL UJI TURNITIN**

Artikel new

---

ORIGINALITY REPORT

---

<b>12%</b> SIMILARITY INDEX	<b>12%</b> INTERNET SOURCES	<b>3%</b> PUBLICATIONS	<b>2%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

---

PRIMARY SOURCES

---

<b>1</b>	<b>aksiologi.org</b> Internet Source	<b>12%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin</b> Student Paper	<b>&lt;1%</b>

---

Exclude quotes  On      Exclude matches  Off  
Exclude bibliography  On

**EVALUASI PERMENSOS NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI  
KEMISKINAN  
(Studi Banding di Desa Sawo dan Dukunanyar Kecamatan Dukun Kabupaten  
Gresik Jawa Timur)**

Nurul Islamiyah  
Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[nurulislamiyah833@gmail.com](mailto:nurulislamiyah833@gmail.com);

Radjikan  
Program Studi Adminsitrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[radjikan@untag-sby.ac.id](mailto:radjikan@untag-sby.ac.id);

Indah Murti  
Program Studi Adminsitrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UNiversitas 17 Agustus 1945 Surabya  
[indah@untag-sby.ac.id](mailto:indah@untag-sby.ac.id);

### **ABSTRAK**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga atau seseorang yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang sudah diolah dari pusat dengan berbagai data sampai ditetapkannya sebagai kategori Program Keluarga Harapan (PKH).

Tetapi tidak bisa dipungkiri juga dengan melibatkan berbagai aspek atau orang yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program pusat yang digunakan untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat Rumah Tangaa Sangat Miskin (RTSM) bisa berjalan dengan mulus, ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi.

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Sawo dan Desa Dukunnayar dan untuk menganalisis perbandingan dampak positif dan negatif dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni kualitatif deskriptif

Hasil dari penelitian ini bahwa proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar, secara keseluruhan dikatakan kurang untuk keduanya. Untuk dampak negatif negatif yang timbul di antaranya: munculnya kecemburuan sosial, mengharapkan bantuan, membuat seseorang malas bekerja, gagal buka rekening kolektif (burekol) dan adanya perbedaan nama dengan sistem (kasuistik).

**Kata Kunci :** *Evaluasi Kebijakan, Kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH)*

## A. PENDAHULUAN

Di negara berkembang saat ini seperti halnya Negara Indonesia permasalahan yang masih sering kali dihadapi yakni masalah cukup tingginya angka kemiskinan yang ada. Berdasarkan pada (Perpres RI No 166 Tahun 2014) kemiskinan merupakan permasalahan Negara yang dilakukan dengan mendesak dan memerlukan langkah-langkah untuk dapat melakukan penanganan dengan cara yang sistematis dan juga menyeluruh agar dapat mengurangi rasa beban dalam pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat Negara melalui pembangunan secara inklusif, adil dan juga berkelanjutan dalam mewujudkan kehidupan yang bermartabat untuk warga Negara.

Kemiskinan menjadi hal yang sangat fenomenal pada bidang ekonomi seperti halnya rendahnya pendapatan dan konsumsi yang dirasakan oleh masyarakat dan juga menjadi tolok ukur atau sebagai acuan pada bidang ekonomi. Penyebab dari kemiskinan tentunya menjadi masalah yang besar bagi masyarakat yang akan berdampak negatif pada: konsumsi kesehariannya, kesehatan, pendidikan atau lainnya. Hal yang dapat memicu terjadinya kemiskinan yakni jumlah penduduk yang meningkat tetapi lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampungnya sehingga masyarakat banyak yang menganggur dan tidak memiliki penghasilan sehingga terbentuk kemiskinan (Al Maududi, 2017).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2009 pasal 21 tentang kesejahteraan sosial, beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan seperti halnya: adanya penyuluhan dan bimbingan, memiliki akses pelayanan, memiliki akses dalam pelayanan kesehatan penyediaan dalam pelayanan pendidikan dan sebagainya, dengan berbagai bentuklah pemerintah memberikan kebutuhan dasarnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat ini. Dalam hal ini pemerintah juga memberikan tanggung jawab kepada kepala daerah provinsi yakni gubernur

dan untuk tingkat kota/kabupaten yakni kepada walikota/bupati sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden Tahun 2009 pasal 21.

Permasalahan kemiskinan juga tentunya memicu terjadinya kriminalitas yang tinggi (Liputan6, 2020). Karena dengan adanya kehidupan yang serba terbatas dengan perolehannya dan meningkatnya kebutuhan tentunya sangat memungkinkan sekali seseorang (orang miskin) cenderung melakukan apa saja untuk dapat memenuhi kebutuhannya, salah satunya yakni melakukan tindakan kriminalitas ini. Kriminalitas yang dilakukannya bisa berupa pencurian, begal, penipuan atau lainnya yang tentunya juga akan berdampak negatif dan membahayakan orang lain dalam hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut ternyata kemiskinan tentunya juga akan bermasalah pada tingginya angka kematian seorang ibu (terutama ibu hamil) (Institute, 2010). Karena dengan adanya keterbatasan layanan kesehatan yang merupakan barang mahal karena semua serba memerlukan biaya, dengan adanya keterbatasan seseorang (orang miskin) yang hanya mendapatkan penghasilan yang sedikit, sehingga mereka tidak bisa dalam melakukan akses layanan kesehatan, yang aslinya ibu hamil perlu pengecekan untuk mengetahui kondisi janin, karena keterbatasannya akhirnya mereka lambat dalam mengambil keputusan dan juga tentunya terlambat juga untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, sehingga ibu hamil tidak terselamatkan begitupun dengan anaknya (pertumbuhan anak).

Untuk itu dengan adanya kemiskinan yang dapat mengakibatkan permasalahan yang luas tersebut, tidak kestabilan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya dan mengakibatkan hal negatif pada diri sendiri atau bahkan dapat memberikan dampak negatif pada orang lain. Dengan pemerintah yang memiliki pemegang kekuasaan tertinggi di Negara ini dalam melakukan pemberantasan kemiskinan, salah satunya cara yakni dengan mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan yang pro dengan masyarakat kurang mampu atau miskin melalui program Keluarga Harapan (PKH) (Najidah & Lestari, 2019).

Berdasarkan lansiran (Hukumonline.com, 2018) Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga atau seseorang yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang sudah diolah dari pusat dengan berbagai data sampai ditetapkannya sebagai kategori Program Keluarga Harapan (PKH). Jadi PKH ini dalam mendapatkan bantuan harus ada beberapa persyaratan yang terdaftar dalam aplikasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang didaftarkan melalui pemerintah desa masing – masing, sampai dengan diolah oleh bagian pusat

(Kemensos) untuk ditetapkannya sebagai kategori Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam pendapatan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini ada beberapa kriteria yang dapat diberikan diantaranya: komponen kesehatan (ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0-6 tahun), komponen pendidikan (mulai jenjang SD-SMA sederajat wajib belajar 12 tahun, umur 6-12 tahun dan untuk komponen kesejahteraan sosial (lanjut usia mulai umur 60 tahun dan penyandang distabilitas).

Dengan adanya program bantuan sosial seperti halnya Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak ada hentinya pemerintah lakukan dalam penanggulangan kemiskinan, diharapkan pemerintah dalam pengelolaannya bisa dilakukan dengan baik dan efektif terhadap kewenangan yang diberikannya (Setiawan, 2017). Untuk itu dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) yang dianggap pemerintah sesuai dalam menangani persoalan kemiskinan dengan pemerintah memiliki kewenangan atau pihak yang terkait memiliki kewenangan agar bisa dilakukan dengan baik dan efektif sehingga program tersebut bisa sesuai dan tepat sarannya.

Tetapi tidak bisa dipungkiri juga dengan melibatkan berbagai aspek atau orang yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), yang termasuk dalam program pusat yang digunakan untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat RTSM bisa berjalan dengan mulus. Merujuk pada Wibawa (Nizar, 2019) mengemukakan bahwa dalam realita yang terjadi di lapangan yang selama ini, bahwa kebijakan publik tidak selamanya sesuai dengan sarannya, meskipun program tersebut sudah direncanakan sedemikian rupa sebelum kebijakan dilaksanakan. Hal ini tentunya tidak bisa dipungkiri, dengan adanya berbagai keterlibatan seseorang dalam program tersebut terdapat penyimpangan atau masalah dari peraturan program tersebut.

Dengan adanya program yang sudah di susun secara betul oleh pemerintah dan sudah dianggap pro dengan masyarakat dalam kesejahteraan masyarakat bersyarat tersebut. Perlu adanya evaluasi kebijakan yang dilakukan terkait adanya program, permasalahan yang ada, penyebab adanya perubahan atau lainnya (Permatasari, 2020). Evaluasi ini tentunya perlu dilakukan betul untuk mengetahui sejauh mana program yang sudah dilaksanakan pemerintah sehingga program tersebut bisa dikatakan efektif dan sesuai dengan sasaran masyarakat.

Di sisi lain juga masih terdapat penyimpangan yang terjadi, berdasarkan data primer yang ada masih dijumpai adanya demo di depan Kantor Dinas Sosial (Dinsos) mengatasnamakan dirinya sebagai Komite Masyarakat Gresik (KMG). Mereka melakukan unjuk rasa untuk mendesak

para oknum yang melakukan penyelewengan dugaan pendistribusian Program Bantuan Pangan Non tunai (BPNT), masih dijumpai ada warga yang mampu tapi masih mendapatkan. Permasalahan atau keadaan di lapangan yang sering kali warga yang mendapatkan tidak sesuai dengan persyaratan yang ada (ketidak sinkronan antara data dengan DTKS dengan situasi KPM), lambannya dalam pemberian bantuan, bantuan diberikan tidak sesuai dengan jumlahnya, rendahnya partisipasi dan pemahaman KPM, dan masalah administrasi lainnya. Untuk itu dalam implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam Program Keluarga Harapan (PKH), perlu adanya evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dilaksanakan tersebut.

Maka dari itu peneliti ingin meneliti yang berkaitan dengan judul “Evaluasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Banding di Desa Sawo dan Dukunanyar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Jawa Timur)” peneliti akan melakukan perbandingan di Kecamatan Dukun yakni desa Sawo yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tertinggi yakni berjumlah 277 Orang dan juga desa Dukunanyar yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terendah yakni berjumlah 34 orang.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam mengevaluasi suatu kebijakan atau program yang dilakukan oleh pemerintah, untuk dapat menilai kebijakan yang sudah diimplementasikan. Terdapat teori dari Ripley yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kebijakan yang sudah diimplementasikannya. Dalam kriteria ini menekankan pada pencapaian tujuan dari usaha yang sudah dilakukan dalam evaluasi kebijakan. Artinya, evaluasi dilakukan dengan merujuk pada pelaksanaan usaha yang dilakukan atau diimplementasikan dari kebijakan tersebut. Menurut Ripley (Purwanto & Sulistyastuti, 2012) ada beberapa yang dapat digunakan untuk dapat menilai kualitas kebijakan atau program yang diimplementasikan diantaranya :

### **Akses**

Digunakan untuk mengetahui bahwa program dapat dijangkau dengan mudah oleh sasaran. Dalam hal ini kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi atau menyampaikan pengaduan mengenai program tersebut juga termasuk dalam aspek ini. Selain itu, akses juga meliputi kesempatan bagi semua kelompok sasaran dalam pelaksanaan program tanpa melihat etnisitas, agama, afisiiasi politik. Dengan demikian, akses berarti tidak



adanya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.

### **Cakupan**

Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau oleh kebijakan yang diimplementasikan.

### **Frekuensi**

Frekuensi merupakan indikator untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program. Semakin tinggi frekuensi bantuan yang diberikan maka akan semakin baik implementasi suatu kebijakan atau program tersebut.

### **Bias**

Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementator bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang tidak *eligible* (dinyatakan layak dan memenuhi syarat) untuk menikmati bantuan, hibah atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program.

### **Service delivery (Ketepatan layanan)**

Indikator ini digunakan untuk menilai ketepatan waktu dalam melakukan pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu kebijakan. Aspek ini menilai *output* suatu kebijakan yang memiliki sensitivitas terhadap waktu. Artinya keterlambatan dalam implementasi kebijakan tersebut akan membawa implikasi kegagalan mencapai tujuan kebijakan tersebut.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas digunakan untuk menilai pertanggungjawaban dari implementator dalam menjalankan tugas untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran. Petanyaan yang perlu diajukan dalam aspek ini menyangkut apakah hak-hak kelompok sasaran dikurangi atau tidak. Jika ada pengurangan hak-hak kelompok sasaran apakah tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau merupakan bentuk-bentuk penyimpangan.

### **Kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan**

Kesesuaian program dengan kebutuhan ini digunakan untuk menilai apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan atau tidak.

### C. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk mempengaruhi atau menafsirkan fenomena yang diambil dengan menggunakan pendekatan pada studi kasus yang diambil. Dalam penelitian ini nantinya akan berfokus dengan beberapa pokok pembahasan terkait permasalahan yang diangkat yakni untuk menganalisis proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar dan untuk menganalisis perbandingan dampak positif dan negatif dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar. Untuk dapat mempermudah dalam menganalisis hasil dari penelitian, peneliti dalam metodologi evaluasi program menggunakan jenis evaluasi dengan mengacu pada pendapat Ripley (Purwanto & Sulistyastuti, 2012).

Tempat penelitian yang digunakan berada di wilayah Kecamatan Dukun yang berlokasi di Desa Sawo dan juga Desa Dukunanyar. Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena di wilayah Gresik tentunya semua kecamatan mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), untuk itu penulis memilih kecamatan Dukun untuk dijadikan tempat lokasi penelitian dengan disertai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga tersebut terhadap implementasi yang sudah dilakukannya. Untuk Desa Sawo merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tertinggi di Kecamatan Dukun sedangkan Desa Dukunanyar merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terendah di Kecamatan Dukun.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yakni menggunakan data primer (diperoleh dari informan penelitian) dan juga berdasarkan data sekunder (data yang diperoleh melalui berbagai dokumen atau jurnal yang relevan dengan penelitian). Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Dan Dalam pelaksanaan teknik analisis data kualitatif dilakukan pada waktu peneliti berada di lapangan atau bisa setelah kembali dari lapangan baru melakukan analisis, analisis data dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Sebagaimana menurut milles dan huberman (Ridder, 2014) alur yang digunakan untuk analisis yakni mengikuti model analisis interaktif, teknik yang digunakan dalam menganalisis data yakni sebagai berikut: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

#### D. PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian merupakan sebuah penjelasan dan interpretasi akhir dalam melakukan pengujian data dengan berpacu pada sebuah teori dan konsep para ahli, sehingga dapat menjelaskan sesuatu berdasarkan teori atau bahkan menemukan teori yang baru untuk mendiskripsikan hasil dari data atau fakta yang ada di lapangan. Dalam hal ini peneliti akan menghubungkan temuan hasil penelitian yang ada di lapangan dengan menggunakan teori yang digunakan untuk menganalisis proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar, dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut Ripley (Purwanto & Sulistyastuti, 2012). Dalam teori tersebut di dalamnya ada 7 aspek yang akan dibahas di dalam penelitian ini menurut teori tersebut, yakni:

##### **Proses Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Sawo dan Dukunanyar Akses**

Menurut Ripley (Purwanto & Sulistyastuti, 2012) akses digunakan untuk mengetahui bahwa program dapat dijangkau dengan mudah oleh sasaran. Kemudahan yang dimaksud dalam hal ini yakni bahwa masyarakat yang menjadi sasaran dalam program yang diimplementasikan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh informasi atau menyampaikan pengaduannya terkait program yang diimplementasikan. Akses dalam hal ini juga masyarakat yang menjadi sasaran program tanpa harus melihat etinitas, agama, afisiasi politik maupun lainnya, yang mana semua masyarakat yang menjadi sasaran dalam program tidak adanya diskriminasi yang melekat dalam individu maupun kelompok, karena semuanya sama.

Dari hasil wawancara di atas untuk Desa Sawo menunjukkan bahwa untuk segala informasi dilakukan melalui sosial media (sosmed) atau wa group dan hal tersebut sangat memudahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan informasi, semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) akan dibuatkan group, dan komunikasi atau informasi akan disampaikan melalui group wa yang ada tersebut, dan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak memiliki WhatsAap (WA) maka segala informasi yang di *share* melalui wa group akan diberitahukan oleh ketua kelompok dari masing-masing kelompok kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Begitupun juga hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti di Desa Dukunanyar yang menunjukkan bahwa dalam hal akses ini sudah dikatakan baik, karena Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah mendapatkan informasi, informasi mudah didapatkan, karena informasi dapat diperoleh melalui wa group yang sudah dimiliki masing-masing.

Tetapi dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Sawo dikatakan cukup, karena seringkali informasi yang diperoleh oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya dari pihak pendamping, karena informasi apapun yang mengetahui yakni dari pihak pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang setelah itu akan disampaikan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari pihak Kepala Desa atau Pemerintah Desa kalau ada informasi juga akan dikasih tau oleh pihak pendamping, jika pendamping lupa tidak menyampaikan maka pihak pemerintah desa tidak akan mengetahuinya, untuk tempat pertemuan yang dilakukan oleh pihak pendamping dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sangat jarang sekali bertempat di balai desa, tetapi lebih ke rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga dari pihak desa kurang mengetahui apabila ada informasi yang baru, tetapi dari pihak kepala desa dan juga pendamping tetap untuk melakukan koordinasi.

Dan hasil observasi yang dilakukan di Desa Dukunnayar juga dikatakan cukup, Karena seringkali pihak pemerintah desa tidak mengetahui secara langsung apabila ada informasi yang baru baik ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum bisa cair bantuannya, karena yang mengetahui informasi yakni pihak pendamping. Dan pemerintah desa juga baru mengetahui apabila ada pengaduan yang dilakukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukannya, sehingga informasi yang diperoleh dari pihak pemerintah desa tentunya kurang maksimal, tetapi pihak pemerintah desa dan pendamping selalu melakukan kordinasi dan membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) jika ada kendala yang dirasakan.

Dalam hal akses yang ada di Desa Sawo dan Dukunanyar ini tentunya masih dikatakan cukup, karena pihak pemerintah desa juga terkadang kurang mengetahui informasi yang ada, sehingga dengan kurangnya informasi tersebut tentunya dapat memperlambat informasi yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) apabila bertanya kepada pihak pemerintah desa, dan pemerintah desa juga terkadang baru mengetahui informasi apabila ada pengaduan yang dilakukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kepada pihak pemerintah desa, karena pertemuan kepada pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seringkali tidak melakukan

pertemuan di balai desa tetapi di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau ketua kelompok, sehingga informasi dari pihak pemerintah desa tentunya masih kurang.

### **Cakupan**

Dalam indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan layanan, transferan dana atau bantuan dan lainnya) oleh kebijakan yang diimplementasikan. Menurut Ripley (Purwanto & Sulistyastuti, 2012) bahwa kelompok yang menjadi sasaran harus dapat dijangkau dalam mendapatkan layanan, bantuan yang diimplementasikan, artinya dalam hal ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan ini tentunya harus mencakup secara keseluruhan bantuan yang diberikan seperti halnya layanan, transferan dana maupun lainnya sesuai dengan komponen yang dimilikinya.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentunya bantuan atau layanan yang diberikan itu sudah mencakup secara keseluruhan sesuai dengan komponen yang dimiliki, Dari pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga merasa bantuan yang diberikan sudah mendapatkan layanan, tetapi ada juga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) tetapi tidak digunakannya.

Sedangkan hasil penelitian dari Desa Dukunanyar yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan bantuan yang diberikan kepada pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah mencakup secara merata, bagi yang belum mendapatkan nantinya juga akan dibantu dalam pembuatan, tetapi untuk jumlah bantuan sesuai dengan jumlah komponen yang dimilikinya. Tetapi menurut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sendiri jenis bantuan yang diberikan belum mencakup secara merata, karena ada juga Keluarga penerima Manfaat (KPM) yang tidak mendapatkan (Kartu Indonesia Pintar) KIP padahal memiliki anak yang sekolah, tetapi dalam hal layanan kesehatan sudah cukup.

Sehingga dalam hal cakupan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Desa Sawo sudah dikatakan baik karena cakupan yang diberikan di Desa Sawo sudah mencakup secara merata. Tetapi untuk di Desa Dukunanyar yakni cukup karena masih ada sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki anak masih sekolah yang berada di jenjang menempuh sekolah wajib belajar 12 tahun, tetapi tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

### **Frekuensi**

Frekuensi ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa sering Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat memperoleh bantuan yang diberikan. Jika semakin tinggi frekuensi maka akan semakin baik implementasi kebijakan yang dilakukan.

Dari hasil wawancara di atas untuk Desa Sawo menunjukkan bahwa untuk pemberian bantuan berupa pencairan dan yang diberikan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sering kali terjadinya kemoloran dana yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bantuan yang diberikan seringkali tidak sesuai dengan aturan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH), dari hasil wawancara juga masih ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam hal bantuan dia tidak selalu mendapatkan, karena terkadang juga dia tidak mendapatkannya, dan juga untuk bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga sampai sekarang masih belum cair lagi.

Dari hasil wawancara di lapangan yang sudah dilakukan peneliti di Desa Dukunanyar menunjukkan bahwa untuk pemberian bantuan berupa pencairan yang diberikan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan secara bertahap yakni untuk triwulan 1 bulan januari, februari, maret untuk tanggalnya tidak pasti. Tetapi menurut warga sering kali terjadinya kemoloran dana yang diberikan kepada penerima, terkadang waktu pencairan maju dan juga bisa jadi mundur tidak pasti, bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga sampai sekarang masih belum cair lagi.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan, Desa Sawo dan Dukunanyar ini dalam hal frekuensi masih dikatakan kurang, kendala yang sering terjadi dalam hal frekuensi yakni bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan sering kali tidak konsisiten karena terkadang mendapatkan bantuan dan terkadang juga tidak mendapatkan bantuan yang diberikannya, padahal dia masih termasuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bantuan yang diberikan juga masih seringkali molor dan juga untuk bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga sampai sekarang masih belum cair lagi.

### **Bias**

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah bantuan yang diberikan oleh implementator bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang tidak *eligible* (dinyatakan layak dan memenuhi syarat) untuk dapat menikmati bantuan yang diberikan oleh pihak pemerintah melalui kebijakan atau program, Ripley (Purwanto & Sulistyastuti, 2012).

Dari hasil wawancara di Desa Sawo menunjukkan, menurut pihak Kepala Desa (Pemerintah Desa Sawo) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sawo, bahwa untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sawo ini sudah tepat sasaran karena berdasarkan data yang ada merupakan data valid dan sebelumnya sudah dilakukan survey untuk melihat kondisi sebenarnya warga dan komponen yang dimilikinya dengan berbagai proses, sampai mereka dikatakan layak untuk mendapatkan bantuan, tetapi dengan berjalannya waktu kalau ada warga yang mendapatkan bantuan tersebut mampu makan bantuan tersebut akan dicabut. Tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan KPM masih ada warga Desa Sawo yang belum tepat sasaran dalam mendapatkan bantuan, dan untuk bantuan yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diperoleh (kelebihan atau kekurangan).

Sedangkan hasil penelitian di Desa Dukunanyar menurut pihak pemerintah desa bahwa tidak pernah terjadinya penyimpangan yang ada, jika ada warga yang mampu tetapi mendapatkan maka pihak pendamping akan melaporkan, dan saat calon pertama warga yang mendapatkan juga dilakukan koordinasi antara pihak pemerintah desa dengan pendamping. Menurut pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan yang diberikan sesuai dengan komponen yang dimilikinya, dan untuk terkait pertimbangan yang dilakukan untuk sasaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini, untuk Desa Dukunanyar dulunya ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mampu tetapi dapat bantuan, untuk saat ini sudah tidak ada lagi karena sudah banyak yang dilakukan graduasi atau dicabut dari bantuan yang diberikannya.

Sehingga untuk komponen service delivery (ketepatan layanan) di Desa Sawo dan Dukunanyar berdasarkan hasil yang ada di lapangan dengan teori untuk Desa Sawo masih kurang, karena ada beberapa bias yang masih ditemui oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diantaranya : masih dijumpai tidak tepat sasaran bantuan yang diberikan dan warga yang mendapat jumlah yang diberikan tidak sesuai. Sedangkan untuk di Desa Dukunanyar sudah baik, karena KPM yang mendapatkan sudah sesuai dengan jumlahnya dan tepat sasaran.

#### **Service delivery (ketepatan layanan)**

Menurut Ripley (Purwanto & Sulistyastuti, 2012) indikator ini digunakan untuk menilai ketepatan pada layanan yang diberikannya dalam implementasi kebijakan. Artinya dalam indikator ini digunakan untuk menilai kebijakan yang sudah diimplementasikan, yang memiliki sensitivitas

terhadap waktu. Apabila terjadi keterlambatan dalam implementasi kebijakan, maka akan membawa implikasi kegagalan untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Sawo menunjukkan bahwa untuk layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sudah tepat layanan, karena dalam hal ini pihak pemerintah desa dan juga pendamping melakukan kordinasi dengan pihak terkait layanan tersebut, tetapi untuk sekarang sudah jarang melakukan komunikasi dengan pihak layanan dan sekarang juga tidak ada lagi absen yang digunakan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sendiri juga merasakan tepat layanan yang sudah diberikan oleh pihak pemerintah, tetapi bantuan uang yang digunakan untuk menunjang pembayaran layanan yang berbayar, sering kali bantuan yang diberikan molor.

Untuk hasil wawancara di Desa Dukunanyar sudah dikatakan baik, karena untuk ketepatan layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah tepat waktu. Hanya saja terkadang dari pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkadang kurang maksimal dalam memanfaatkan layanan yang diberikannya, tetapi di lain waktu biasanya baru mengikuti layanan yang diberikan.

Tetapi setelah observasi yang dilakukan oleh peneliti, ketepatan layanan yang didapat baik dari Desa Sawo maupun Desa Dukunanyar masih dikatakan cukup, karena pihak pendamping juga sudah jarang komunikasi dengan pihak layanan yang terkait, yang dulunya ada absen kehadiran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang melakukan layanan, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, dari pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga masih kurang maksimal untuk memanfaatkan layanan yang diberikannya, dan juga bantuan yang diberikan untuk menunjang layanan yang berbayar terkadang waktu yang diberikan tidak sesuai atau molor, dan tentunya menyebabkan kemoloran atau terhambatnya dalam menunjang layanan yang diberikan.

Oleh karena itu dalam hal service delivery (ketepatan layanan) antara di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar ini masih dikatakan cukup, karena setelah observasi yang dilakukan oleh peneliti, masih dijumpai beberapa permasalahan seperti di atas.

### **Akuntabilitas**

Menurut Ripley (Purwanto & Sulistyastuti, 2012) bahwa akuntabilitas digunakan untuk menilai pertanggungjawaban dari implementator dalam



menjalankan tugas untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Sawo menunjukkan bahwa dari pihak yang dilakukan yakni ketika ada informasi bantuan yang molor maka pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bahwa informasi selalu disampaikan kepada pihak KPM, disuruh menunggunya, untuk pihak pendamping lebih ke perubahan *mindset* kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), informasi yang diberikan melalui wa group. Hak-hak yang diperoleh oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diantara berupa bantuan uang, sembako, layanan dan juga pendampingan yang tentunya sangat penting untuk mengubah mindset pola pikir Keluarga Penerima Bantuan (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan ini.

Sedangkan untuk hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti saat di Desa Dukunanyar menunjukkan bahwa dari pihak yang dilakukan yakni ketika ada informasi bantuan yang molor maka pertanggungjawaban yang dilakukan, pemerintah desa akan melakukan kordinasi lagi dengan pihak pendamping untuk dibantu solusi dari permasalahan pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut, pihak pendamping juga memberi informasi melalui wa group, dan juga melakukan pengedukasian kepada KPM. Hak-hak yang diperoleh oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diantaranya berupa bantuan uang, sembako, layanan dan juga pendampingan yang tentunya sangat penting untuk mengubah *mindset* Keluarga Penerima Bantuan (KPM) atas bantuan yang diberikan ini.

Sehingga dapat disimpulkan realita yang ada di lapangan dengan teori terkait kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah maupun pihak pendamping dalam hal akuntabilitas yang ada di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar ini sudah baik. Karena semua informasi-informasi selalu disampaikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam menjalankan tugasnya untuk menyampaikan keluaran kebijakan.

#### **Kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan**

Untuk menilai apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan atau tidak, Ripley (Purwanto & Sulistyastuti, 2012) Artinya bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini harus sesuai dengan kebutuhannya yang benar-benar membutuhkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sawo dalam wawancara tersebut, menunjukkan bahwa warga yang mendapatkan

bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) memang membutuhkan dan sudah sesuai, karena sebelumnya juga ada berbagai proses yang dilakukan dan dengan komponen yang dimilikinya. Dan pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Sawo ini juga tentunya sangat terbantu, dan di warga Desa Juga masih dijumpai ada yang seharusnya tidak mendapatkan justru malah mendapatkan begitupun sebaliknya, tetapi sebagian tersebut sudah ada warga yang mampu tapi dicabut dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini.

Tetapi hasil penelitian yang didapatkan peneliti di Desa Dukunanyar dalam wawancara tersebut, menunjukkan bahwa menurut Kepala Desa Dukunanyar, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Dukunanyar memang membutuhkan, karena sudah dilakukan ketika ada warga mampu yang mendapatkan akan dilaporkan mampu, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berjalan saat ini memang membutuhkan, karena sebelumnya sudah banyak masyarakat di Desa Dukunanyar yang sudah dilakukan graduasi karena mampu tetapi mendapatkan bantuan.. Begitupun juga menurut pendamping bahwa warga yang mendapatkan bantuan PKH sudah sesuai.

Menurut Ripley (Purwanto & Sulistyastuti, 2012) bahwa harus ada kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan. Untuk itu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan harus sesuai dengan kriteria yang ada. Dalam hal kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan yang dikemukakan oleh Ripley (Purwanto & Sulistyastuti, 2012) untuk Desa Sawo ini masih dikatakan cukup, karena masih ada warga di Desa Sawo yang mendapatkan bantuan PKH belum tepat sasaran, tetapi sebagian sudah dilakukan graduasi.

Untuk di Desa Dukunanyar dalam hal kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan sudah dikatakan baik, karena Kelaurag Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan sudah sesuai dan tepat sasaran sesuai dengan kebijakan yang ada.

### **Perbandingan Dampak Positif dan Negatif Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Sawo dan Dukunanyar**

Dari adanya evaluasi kebijakan Permensos (Peraturan Menteri Sosial) No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi kemiskinan yang dilakukan peneliti dalam penelitian skripsi ini, maka dapat diketahui dampak positif dan dampak negatif dari adanya Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar hampir keseluruhan memiliki kesamaan diantaranya :

### **Dampak Positif Program Keluarga Harapan (PKH)**

Dampak positif untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diantaranya yakni:

1. KPM merasa terbantu dengan adanya bantuan dalam memenuhi atau menghidupi keluarganya dengan adanya bantuan yang diberikan
2. Dengan adanya layanan yang diberikan, KPM tentunya dapat memantau kesehatannya, serta dapat mendapatkan layanan sebagaimana dengan orang lainnya.
3. Tidak ada alasan putus sekolah maupun hal negatif lainnya, perihal pemasukan dan pengeluaran kebutuhan yang tidak seimbang
4. KPM dapat mengubah mindsetnya, karena dalam bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan pendampingan langsung oleh pihak pendamping
5. Dapat meminimalisir angka kemiskinan yang tinggi.

### **Dampak Negatif Program Keluarga Harapan (PKH)**

Dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini juga tentunya ada dampak negatif yang muncul diantaranya:

- a) Munculnya kecemburuan sosial kepada pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan
- b) Mereka yang mendapatkan tentunya sudah mengharapkan bantuan yang diberikannya
- c) Terkadang bisa membuat seseorang malas dan akhirnya merintih untuk meminta bantuan saja.

Selain itu dampak negatif yang dirasakan di Desa Dukunanyar dengan adanya bantuan ini juga mengakibatkan munculnya:

- a) Adanya gagal burekol (buka rekening kolektif) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan terkadang masih belum dapat Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
- b) Adanya perbedaan nama kependudukan dengan sistem (Kasustik) sehingga bantuan yang diberikan tidak bisa cair.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di paparkan di atas, bahwa kesimpulan yang dapat diambil dengan adanya Permenos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar, secara keseluruhan dalam proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Sawo dan Desa

Dukunanyar ini setelah dilakukan wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan, peneliti juga menghubungkan dengan menggunakan teori yang digunakan untuk menganalisis proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar. Untuk itu secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar dikatakan kurang untuk keduanya.

Untuk proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Sawo ini masih kurang, ada beberapa komponen yang masih kurang diantaranya dalam hal akses, frekuensi, bias, *service delivery* (ketepatan layanan) dan kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan. Sedangkan untuk proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Dukunanyar juga secara keseluruhan masih kurang, ada beberapa komponen yang kurang diantaranya dalam hal akses, cakupan, frekuensi, *service delivery* (ketepatan layanan).

Dalam hal akses yang ada di Desa Sawo dan Desa dukunayar ini dikatakan cukup, karena seringkali informasi yang didapat hanya dari pihak pendamping, pihak pemerintah desa seringkali terlambat atau kurang mengetahui apabila ada informasi yang baru terkait bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), karena apabila ada pertemuan kepada pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seringkali dilakukan di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau ketua kelompok tidak di balai desa, tetapi antara pihak pemerintah desa dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) selalu berupaya untuk melakukan kordinasi.

Untuk cakupan di Desa Dukunanyar masih dikatakan cukup karena masih ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masih memiliki anak sekolah wajib belajar 12 tahun tetapi tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Desa Sawo dan Desa Dukunanyar dalam hal frekuensi terkait bantuan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini masih dikatakan kurang, karena seringkali bantuan yang diberikan tidak tepat waktu, bantuan yang diberikan sering molor, bahkan untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga masih belum cair juga.

Dalam hal bias di Desa Sawo masih dikatakan kurang karena masih dijumpai ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran dan juga masih ada ketidak sesuaian jumlah bantuan. Di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar dalam *service delivery* (ketepatan layanan) masih dikatakan cukup, karena pihak pendamping dengan pihak sekolah maupun puskesmas sudah tidak ada lagi

absen yang digunakan untuk memantau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendapatkan layanan sesuai dengan komponen yang dimilikinya, begitupun kehadiran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan layanan juga masih kurang bisa memaksimalkannya. bahwa dalam hal kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan yang ada di Desa Sawo ini masih dikatakan cukup karena masih ada warga yang mendapatkan tidak tepat sasaran.

Di sisi lain juga dampak positif dari adanya Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sawo dan Desa Dukunanyar diantaranya: KPM merasa terbantu dengan adanya bantuan, KPM dapat mendapatkan layanan sebagaimana dengan orang lainnya, tidak ada alasan lagi putus sekolah maupun negatif lainnya perihal pemasukan dan pengeluaran yang tidak seimbang, secara tidak langsung dapat mengubah mindsetnya, meminimalisir angka kemiskinan yang tinggi.

Sedangkan dampak negatif yang timbul dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Sawo dan Dukunanyar diantaranya Munculnya kecemburuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan diantaranya, mengharapkan bantuan yang diberikannya, terkadang bisa membuat seseorang malas dan akhirnya merintih untuk meminta bantuan saja, adanya gagal burekol (buka rekening kolektif) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan terkadang masih belum dapat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan juga adanya perbedaan nama kependudukan dengan sistem (Kasuistik) sehingga bantuan yang diberikan tidak bisa cair.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Maududi, A. A. A. (2017). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH CV NICKYSAE DALAM MENGATASI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN (Studi di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)*. University of Muhammadiyah Malang.
- Hukumonline.com. (2018). *dasar-hukum-program-keluarga-harapan*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-program-keluarga-harapan-lt5a9f60426664e>
- Institute, W. R. (2010). *Kemiskinan, Penyebab Tingginya Kematian Ibu. Lembar Fakta WRI, 1*, 1–4.
- Liputan6. (2020). *6-penyebab-kemiskinan-pahami-definisi-dan-dampak-yang-ditimbulkan*. <https://hot.liputan6.com/read/4394041/6-penyebab-kemiskinan-pahami-definisi-dan-dampak-yang->

ditimbulkan

- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69–87.
- Nizar, M. (2019). Analisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017. *Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 3(2), 50–60.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33–37.
- Perpres RI No 166 Tahun 2014. (2014). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. 184, 1–27.
- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Tentang kesejahteraan Sosial*.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gave Media.
- Ridder, H.-G. (2014). *Book Review: Qualitative data analysis. A methods sourcebook* (Vol. 28, Issue 4). Sage publications Sage UK: London, England.
- Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 3(3).